



Inflasi merupakan suatu masalah klasik yang tidak pernah berakhir di negara manapun, dan selalu menarik untuk diteliti. Dari satu sisi laju inflasi yang tinggi saling kali menjadi kendala bagi pembangunan, sebab laju inflasi yang tinggi sering kali menimbulkan akibat-akibat buruk bagi masyarakat, disamping juga dapat menghambat laju pembangunan dan merusak hasil pembangunan yang telah dicapai oleh sebuah negara.

Penyebab utama inflasi adalah jumlah uang beredar (pada sisi permintaan) dimana naik turunnya jumlah uang beredar akan berpengaruh langsung pada laju inflasi di dalam negara Indonesia. Pengaruh dari pada faktor-faktor biaya cost terhadap inflasi di dalam negara Indonesia khususnya dari segi pengeluaran untuk mendapatkan sejumlah kelompok barang komoditas.

Padahal di dalam praktek, baik faktor permintaan maupun faktor biaya bekerja secara bersama-sama membentuk inflasi di dalam negara Indonesia. Dari keempat kelompok barang yaitu, Kelompok makanan, Kelompok perumahan, Kelompok sandang; serta Kelompok aneka barang dan jasa.

Oleh karena itu buku ini mencoba untuk memberikan ruang pola pikir dan analiss yang mendasar yang mana kesemuannya mempunyai karakteristik realita suatu negara yang harus dipahami guna “win problematika” dengan menjaga dan mengikuti pembangunan ekonomiyang berkelanjutan di dalam negara Indonesia .

Tamrin Lanori, Pria Kelahiran Sibualong, Dongga, Sulawesi Tengah, 02 Juli 1969, Peraih Doktor Ekonomi pada IPB dan sebagai Dosen ekonomi di berbagai Universitas Moestopo, Universitas Azzahra, Bung Karno dan beberapa Universitas di Ibukota Indonesia

Bambang Heri Supriyanto, Pria kelahiran Kudus, 04 Januari 1978. Aktivis peraih Master Hukum Universitas Islam Djakarta (UID) dan kini sebagai konsultan Hukum Kantor Hukum BHS, sebagai Dosen



Penulis: Dr. Tamrin Lanori., SE. ME. & B. Heri Supriyanto. SH. MH.

Analisis Prilaku Inflasi Negara Indonesia

TINJAUAN HISTORIS EKONOMI

DALAM PUSARA EKONOMI KERAKYATAN



Penulis:

Dr. Tamrin Lanori., SE. ME.

B. Heri Supriyanto. SH. MH.

Diterbitkan oleh :

Global Express Media

Alamat: Taman Jatinegara A2 No.23

Penggilingan, Cakung, Jakarta

Telp: 0812-8522-416

Email: globalcetak34@gmail.com

**Analisis Prilaku Inflasi Negara Indonesia
Tinjauan Historis Ekonomi Dalam Pusara Ekonomi
Kerakyatan**

Penulis:

Dr. Tamrin Lanori., SE. ME.

B. Heri Supriyanto. SH. MH.

Koresponden :

Tamrin Lanori

Desain Sampul & Isi :

Azzahra Studio

ISBN : 978-623-96161-7-5

Diterbitkan oleh :

Global Express Media

Alamat: Taman Jatinegara A2 No.23

Penggilingan, Cakung, Jakarta

Telp: 0812-8522-416

Email: globalcetak34@gmail.com

Cetak Pertama

Juni 2023

KATA PENGANTAR

Buku ini yang berjudul “Analisis Prilaku Inflasi Negara Indonesia Tinjauan Historis Ekonomi Dalam Pusara Ekonomi Kerakyatan” ini berusaha menjelaskan tentang prilaku inflasi yang terjadi di dalam segi perekonomian dalam pembangunan negara Indonesia.

Dengan membaca dan mempelajari buku ini diharapkan para pembaca dapat mengetahui dan memahami tentang perilaku inflasi pada negara Indonesia sehingga akan didapatkan pemahaman yang lebih objektif dalam rangka untuk memahami perilaku inflasi di dalam perekonomian dalam pembangunan di negara Indonesia. Sebagai dasar untuk para pelaku ekonomi dan para pemangku jabatan dalam pemerintahan yang ada di negara Indonesia.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga dapat ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari berbagai pihak demi peningkatan kualitas diri penulis pada karya-karya selanjutnya dan semoga buku ini menjadi khazanah keilmuan Ekonomi khususnya berkenaan dengan perilaku inflasi di negara Indonesia.

Jakarta, 01 Juli 2023

Penulis

Dr. Tamrin Lanori., SE. ME.

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : MUKODIMAH	1
BAB II INFLASI	20
A. Pengertian Inflasi.....	20
B. Beberapa Model Inflasi	23
C. Jenis Inflasi	27
1. Atas Dasar Parah Tidaknya Inflasi	28
2. Atas Dasar Sebab Awal Dari Inflasi	30
3. Atas Dasar Asal Inflasi	31
4. Penelitian Sebelumnya di Indonesia	31
D. Pembagian Wilayah Indonesia KTI dan KBI	38
BAB III RUANG ONSERVASI	42
A. Penentuan Daerah Onservasi	42
B. Analisa Onservasi Inflasi	44
1. Metode Dekomposisi	44
2. Rumus Perhitungan Inflasi Negara Indonesia	52
3. Rumus Untuk Inflasi Kelompok Barang Di Indonesia	52

4. Rumus Untuk Menghitung Andil Kelompok Barang terhadap inflasi umum di Indonesia	53
5. Rumus Perhitungan Untuk KTI dan KBI	54
6. Analisis Varians	56

BAB IV PERHITUNGAN INFLASI NEGARA

INDONESIA ATAS DASAR INDEKS HARGA

KONSUMEN	61
----------------	----

A. Perhitungan Inflasi Negara Indonesia	61
---	----

B. Andil Kelompok Barang Pada Inflasi Umum	70
--	----

C. Beberapa Catatan Penggunaan SBH 1977-1978	73
--	----

1. Bobot Kelompok Barang	73
--------------------------------	----

2. Bobot Kota	79
---------------------	----

BAB V Perilaku Inflasi Di Indonesia tahun 1985 – 1995 ..	81
--	----

A. Perilaku Inflasi Di Indonesia Tahun 1985 - 1995	81
--	----

B. Andil Kelompok Barang, KTI dan KBI Dalam	
---	--

Pembentukan Inflasi di Indonsia Tahun 1985-1995	100
---	-----

BAB VI DEKOMPOSISI INFLASI ANTARA KTI

DAN RBI TAHUN 1985-1995	103
-------------------------------	-----

A. Perbandingan Perilaku Inflasi Antara KTI dan KBI	
---	--

Tahun 1985-1995	103
-----------------------	-----

B. Perbandingan Pola Sumbangan Kelompok Barang	
--	--

Dalam Pembentukan Inflasi Antara KTI dan RBI	
--	--

Tahun 1985-1995.....	106
BAB VII PENUTUP	110
DAFTAR PUSTAKA	116

BAB I

MUKODIMAH

Inflasi merupakan suatu masalah klasik yang tidak pernah berakhir di negara manapun, dan selalu menarik untuk diteliti. Dari satu sisi laju inflasi yang tinggi saling kali menjadi kendala bagi pembangunan, sebab laju inflasi yang tinggi sering kali menimbulkan akibat-akibat buruk bagi masyarakat, disamping juga dapat menghambat laju pembangunan dan merusak hasil pembangunan yang telah dicapai oleh sebuah negara.

Dari kenyataan ini Gubernur Bank Indonesia, Soedradjad Djiwandono (1994) menegaskan bahwa inflasi merupakan "musuh nomor satu" bagi kelangsungan pembangunan. Akan tetapi bila ditinjau dari segi yang lain, inflasi pada "tingkat tertentu" kadang diperlukan untuk memberi dorongan kepada para produsen untuk dapat memacu produksinya secara lebih cepat.

Oleh karena itu suatu negara yang laju tingkat inflasinya tertentu (ideal) mengalami kemajuan dalam pembangunan, dan dianggap sebagai negara yang berhasil mengelola pembangunannya.

Yang menjadi pertanyaan sampai saat ini, seberapa tinggikah “*rate of inflation*” yang ideal bagi pelaksanaan pembangunan? Menurut Nopirin dalam I. D. Yudha Senopati (1995), bahwa laju inflasi yang dianggap ideal berbeda pada setiap negara-negara lainnya sesuai dengan keadaan di dalam negara tersebut.

Di negara industri maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara industri maju lainnya, hanya menetapkan angka toleransi berkisar 3-4% pertahun. Sedangkan pada negara berkembang, angka toleransi laju tingkat inflasi tersebut nampaknya lebih tinggi, mencapai 7-8% pertahun.

Untuk negara Indonesia, telah disepakati oleh para pakar ekonomi dan moneter serta pemerintah sebagai penentu kebijaksanaan untuk memberikan angka toleransi terhadap laju tingkat inflasi satu digit dalam periode pertahun.

Angka inflasi pada tingkat ini, dianggap tidak membahayakan bagi pencapaian sasaran pembangunan, asalkan masyarakat juga memberi dukungan pada program pembangunan yang sedang dilaksanakan, sehingga laju tingkat inflasi tidak melebihi satu digit.

Umumnya negara-negara berkembang bertekad menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa menghadapi masalah inflasi terlalu tinggi. Inflasi yang tinggi bukan saja akan menimbulkan akibat-akibat buruk pada masyarakat, tetapi juga dapat menghambat laju pembangunan.

Pemerintah Indonesia sendiri menyadari bahwa stabilitas nasional yang mantap merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan pembangunan nasional, sehingga terus diupayakan pemeliharaan dan pemantapan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Salah satu stabilitas nasional yang dimaksud adalah stabilitas dalam bidang ekonomi, yang mencakup kestabilan diantaranya seperti tingkat harga, tingkat pendapatan serta tingkat kesempatan kerja yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam rangka menjaga kelangsungan pembangunan nasional.

Untuk memantapkan stabilitas di bidang ekonomi, pemerintah melanjutkan program kebijaksanaan dalam bidang ekonomi yang selama ini dinilai berhasil, seperti diantaranya kebijaksanaan anggaran belanja negara berimbang.

Kebijaksanaan negara Indonesia utamanya di bidang ekonomi yang menjamin keseimbangan moneter dan neraca pembayaran, serta tersedianya barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup, dan tersebar merata dengan harga yang stabil serta dapat dijangkau oleh daya ekonomi masyarakat negara Indonesia.

Kalau ditelusuri kembali kondisi perekonomian negara Indonesia sebelum dilaksanakan pembangunan secara berencana, nampaknya stabilitas ekonomi sangat buruk. Perekonomian nyaris lumpuh. Produksi dan perdagangan mengalami stagnasi dalam hampir setiap sendi-sendi perekonomian.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam negara Indonesia selama periode 1960-1968, rata-rata berkisar 2,6% pertahun. Inflasi pada negara Indonesia selama periode tersebut terus mengalami nilai peningkatan yang memprihatinkan.

Bahkan sampai mencapai nilai 636% pada tahun 1966 (lihat tabel 1). Keadaan ini terjadi akibat adanya “*miss-management*” dalam sisi ekonomi nasional negara Indonesia yaitu antara lain diterapkannya kebijaksanaan ekspansi moneter, pencetakan uang baru guna membiayai defisit anggaran belanja pada negara Indonesia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan belanja roda kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari Tabel 1. Kondisi ekonomi pada negara Indonesia dalam kurun waktu 1960-1968. Periode tersebut pemerintah negara Indonesia melakukan kebijaksanaan peningkatan jumlah uang beredar di dalam negara, menjadi ciri kebijaksanaan di bidang ekonomi pada negara Indonesia saat itu.

Setelah periode ini, perubahan terjadi, akan tetapi tingkat pertambahan uang umumnya masih berkisar antara 30-50% pertahun, sangat kontras bila dibandingkan dengan kondisi normal pada negara-negara yang sering disebut dengan negara maju ekonominya berkisar antara 5-10%. Grenfille (107:1981).

Tabel 1.
Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan
Ekonomi di Indonesia, 1960-1968

Tahun	Inflasi (%)	Pertumbuhan J.U.B (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1960	19	39	-
1961	72	42	5,6
1962	158	99	0,0
1963	128	95	-2,0
1964	135	156	3,2
1965	595	280	1,4
1966	636	763	3,0
1967	112	132	1,7
1968	85	120	7,8

Sumber: Grenville (108:1981), Sinungan (73:1987),
Panetto (515:1987).

Konsekuensi dari pada sebuah kebijaksanaan moneter semacam ini adalah meningkatnya harga-harga secara umum. Harga-harga meningkat dari. 19% pada tahun 1960 menjadi 596% pada tahun 1965 dan mencapai 636% pada tahun 1966.

Setelah jumlah uang yang beredar dapat dikendalikan, pada saat pasca periode tahun 1966, terlihat tampak laju inflasi secara drastis nilainya menjadi turun, yaitu menjadi 112% pada tahun 1967.

Lebih lanjut kalau diperhatikan kembali Tabel 1 terlihat dekatnya hubungan (walaupun tidak sempurna) antara laju inflasi dan jumlah uang beredar di Indonesia,

sehingga timbul anggapan, bahwa tingginya laju inflasi di Indonesia, pada periode tersebut, disebabkan oleh karena meningkatnya jumlah uang beredar di dalam masyarakat.

Pada sisi lain fluktuasi serta pola sumbangan kelompok barang yang merupakan komponen pembentukan inflasi umum di Indonesia selain dari pada jumlah uang beredar, tidak kalah menariknya untuk diteliti. Gambaran dari hasil perhitungan IHK tiga tahun terakhir ini, menunjukkan bahwa pergerakan laju inflasi di negara Indonesia rata-rata 8,65%.

Tingkat inflasi ini pada umumnya terjadi sebagai akibat naiknya beberapa komoditas yang termasuk kelompok bahan makanan, seperti beras, daging, ikan, buah-buahan, susu, telur, sayur-sayuran dan sebagainya. (Lihat tabel 2). Kenaikan harga-harga yang relatif besar pada kelompok makanan. Hal ini harus mendapat tanggapan secara serius karena sebagian besar barang yang termasuk dalam kelompok makanan merupakan jenis barang kebutuhan pokok dan dikonsumsi seluruh lapisan masyarakat. Baik kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, maupun masyarakat berpenghasilan rendah.

Tabel 2.
Pengeluaran Komsumsi Masyarakat Pada empat Kelompok
Barang di Indonesia: Antara KTI dan KBI (Agustus 1994-
Nopember 1994)

No. Klp. Brg Konsumsi	Absolut (Rp)	Relatif (%)	Absolut (Rp)	Relatif (%)	Absolut (Rp)	Relatif (%)
1. Makanan	79.732	26,40	76.527	24,58	78.130	25,48
2. Perumahan	78.574	26,02	81.753	26,26	80.164	26,14
3. Sandang	64.607	21,39	82.540	26,51	67.544	22,03
4. Aneka Brg dan Jasa	79.070	26,18	82.540	26,51	80.805	26,35
Total	301.983	100	311.030	100	306.643	100

Sumber: Kantor Biro Pusat Statistik Indonesia, Data diolah

Dari tabel 2 di atas, terlihat bahwa porsi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi di KTI masih didominasi KBI porsi dominan pengeluaran untuk konsumsi adalah pada kelompok aneka barang dan jasa, sebesar 26,51%. Posisi kedua jatuh pada kelompok aneka barang dan jasa sebesar 26,18% untuk KTI sedang pada KBI posisi terbesar kedua adalah kelompok perumahan sebesar 26,26%.

Selanjutnya posisi terbesar ketiga untuk pengeluaran konsumsi untuk KTI adalah pada kelompok perumahan, yaitu sebesar 26,02%, sedangkan untuk KBI posisi terbesar

ketiga adalah jatuh pada kelompok makanan, yaitu sebesar 24,58%. Selanjutnya porsi terbesar keempat antara KTI dan KBI jatuh pada kelompok sandang yaitu masing-masing sebesar 21,39% untuk KTI dan 22,64% untuk KBI.

Secara nasional bila dilihat dari keempat kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat pengeluaran terbesar berada pada aneka barang dan jasa, sebesar 26,35% diikuti oleh kelompok perumahan sebesar 26,14%, selanjutnya kelompok makanan jatuh pada urutan ketiga, sebesar 25,48% dan yang terakhir kelompok sandang sebesar 22,03%.

Bila diperhatikan angka-angka tersebut pada tabel 2, secara nasional dapat dikatakan bahwa kesejahteraan semakin meningkat, sebab pengeluaran untuk konsumsi telah terarah pada kelompok barang dan jasa, demikian pula pada KBI, sedangkan untuk KTI, masih tergolong berpenghasilan rendah, sebab penghasilannya masih sebagian besar terfokus pada pengeluaran untuk konsumsi bahan makanan.

Meskipun demikian telah memperlihatkan kemajuan yang amat pesat, karena antara kelompok bahan makanan dan kelompok aneka barang dan jasa memperlihatkan selisih angka tidak terlalu berarti, disamping itu semua

kelompok bahan konsumsi keempat komponen yaitu kelompok bahan makanan, kelompok perumahan, kelompok sandang dan kelompok aneka barang dan jasa, memperlihatkan selisih angka-angka relatifnya tidak terlalu berarti, sehingga pertumbuhan semakin berarti di masing-masing sektor.

Setelah dimulai program pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun (PELITA), sebagai sebuah konsep pelaksanaan pembangunan secara berencana, tampak adanya suatu perubahan stabilitas. Pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Laju inflasi dapat ditekan, sehingga tercipta landasan yang kuat bagi pelaksanaan tahapan-tahapan pembangunan selanjutnya.

Melihat tingkat pertumbuhan ekonomi selama periode 1969-1973 (Pelita I) secara rata-rata, mencapai 8,56% pertahun, selama periode pelaksanaan Pelita II (1974-1978) mencapai 7,22% pertahun, selama Pelita III (1979-1983), 6,11% pertahun; selama Pelita IV (1984-1988) 4,19% pertahun.

Bahkan untuk periode pelaksanaan Pelita V (1989-1993) mencapai 5 % pertahun. Laju inflasi dapat ditekan yaitu dari 636% pada tahun 1966 menjadi 10% pada, tahun

1969. Begitu juga pada Pelita selanjutnya, walaupun masih terjadi fluktuasi, tingkat inflasi cenderung telah terkendali pada tingkat inflasi berkisaran angka satu digit (*single-digit*).

Seperti halnya dengan negara-negara berkembang lainnya di dunia, negara Indonesia salah satunya sebagai negara yang sedang berkembang berusaha mengarahkan pembangunan ekonominya, pada usaha guna untuk peningkatan nilai dari pada pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan usaha pemerataan di seluruh wilayah negara Indonesia.

Dalam usaha pembangunan yang diinginkan adalah perubahan struktural, baik ditinjau dari segi pangsa (*share*) masing-masing sektor ekonomi terhadap pendapatan nasional, maupun dari segi penyerapan tenaga kerja yang meningkat dari tahun ketahun.

Di samping itu senantiasa pengontrolan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah untuk mengantisipasi pertumbuhan seperti pengendalian inflasi, jangan sampai terlalu tinggi, sehingga stabilitas ekonomi dapat berjalan sebagaimana diarahkan dalam GBHN untuk memasuki PJPT II. Tanpa perubahan demikian, maka kita akan berada pada kondisi stagnasi.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional negara Indonesia. Dan merupakan sebagai sub-sistem dari pembangunan nasional, Natsir (1990). Perkembangan ekonomi nasional akan banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah. Dalam hubungan ini, maka kebijaksanaan pembangunan ekonomi nasional negara Indonesia yang tepat, diarahkan pada pendekatan pembangunan regional.

Dalam tahapan pembangunan jangka panjang tahap II (PJPT II), rencana kebijakan pembangunan akan diprioritaskan pada pembangunan kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam kaitan ini, Sumitro (1990) Mengemukakan bahwa dewasa ini sudah waktunya "*go east*" dalam meluncurkan pembangunan.

Untuk mengantisipasi prioritas dari pada pembangunan di KTI, maka para pakar ekonomi, teknokrat, budayawan, dan para politikus mulai membahas tentang strategi pembangunan yang akan mempercepat laju pembangunan di KTI.

Berbagai konsep pemikiran ekonomi berkenaan dengan pembangunan yang telah dikemukakan oleh pakar tersebut, pada intinya adalah mengacu pada sumber daya

atau faktor-faktor yang dimiliki pembangunan yang terdapat di KTI.

Dalam hubungan ini terdapat tiga konsep pemikiran pembangunan yaitu:

1. Konsep pertama ditinjau dari aspek modal, dimana konsep ini menitik-beratkan pada peningkatan arus modal (capital) sebagai strategi awal untuk mempercepat laju pembangunan di KTI.
2. Konsep kedua menitik-beratkan pada tinjauan aspek sumberdaya manusia. Konsep ini mengacu pada usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia.
3. Konsep ketiga adalah menitik-beratkan pada pengawasan pembangunan.

Tujuan pengawasan pembangunan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, tanpa menghadapi masalah yang berarti, seperti inflasi yang terkendali. Sebab inflasi yang tinggi tidak saja akan menimbulkan akibat buruk terhadap masyarakat, tetapi juga dapat menghambat laju pembangunan di KTI dan Indonesia pada umumnya.

Pemerintah Indonesia sendiri menyadari bahwa stabilitas di KTI merupakan syarat mutlak kelangsungan

pembangunan nasional, sehingga dapat terus diupayakan pemeliharaan dan pemantapan, stabilitas yang sehat dan dinamis di KTI.

Salah satu stabilitas yang dimaksud diantaranya adalah stabilitas dibidang ekonomi, yang mencakup:

1. Kestabilan tingkat harga,
2. Tingkat pendapatan,
3. Tingkat kesempatan kerja dan,
4. Inflasi yang terkendali.

Berdasarkan pengalaman kondisi perekonomian yang buruk pada periode 1960-1968, penanganan program pembangunan ekonomi di tahun-tahun selanjutnya selalu dikaitkan dengan rangkaian kebijaksanaan anti inflasi.

Dapat terlihat dengan jelas di dalam bentuk Paket Kebijakan yang terdiri dari kebijaksanaan anggaran yang berimbang, yang terkait secara ketat dengan perumusan kebijaksanaan kredit dan tingkat bunga, kebijaksanaan kurs mengambang, kebijaksanaan operasi pasar Bank Indonesia. Turut mempengaruhi jumlah uang beredar, baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk valuta asing.

Pengendalian laju inflasi sangat penting. Mengingat berbagai pengaruh negatif yang ditimbulkan. Pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan antara lain:

1. Pengaruh terhadap tabungan dan arah investasi.

Laju inflasi yang tinggi pada umumnya cenderung mendorong masyarakat untuk membeli barang-barang tetap (perhiasan, tanah dan rumah atau gedung mewah). Masyarakat tidak tertarik untuk menabung di bank, sebab bila uang mereka di tabung di bank maka kekayaan akan habis di makan inflasi yang tinggi. Dengan demikian dana yang tersedia di masyarakat tidak digunakan secara produktif dalam berbagai bidang seperti untuk kegiatan pertanian maupun kegiatan industri.

2. Pengaruh dibidang perdagangan luar negeri.

Laju inflasi yang tinggi tidak menguntungkan ekspor. Pengaruh inflasi sangat terasa terhadap biaya produksi. Sehingga harga barang-barang di dalam negeri lebih tinggi dibanding dengan harga barang-barang di luar negeri, ekspor menurun. sebaliknya impor meningkat.

3. Laju inflasi yang tinggi.

Cenderung akan merugikan golongan masyarakat berpenghasilan tetap. Sebab persentase kenaikan gaji

pada umumnya lebih rendah dari laju inflasi. Bahkan ada kecenderungan harga-harga secara umum meningkat mendahului kenaikan gaji yang direncanakan oleh pemerintah.

Inflasi merupakan menjadi salah satu bentuk penyakit ekonomi yang sering kambuh dan hampir semua negara di dunia ini mengalaminya. Iswardono (57:1988). Berbagai langkah telah ditempuh untuk senantiasa memerangi inflasi. Kebijakan yang berkaitan dengan suatu gejala inflasi dikenal dengan kebijakan stabilitas harga atau kebijakan untuk mencapai keseimbangan intern. Insukindro (136:1993).

Biasa juga disebut stabilisasi harga dengan maksud terciptanya keseimbangan intern. Pertanyaan akan muncul (1) Mengapa harus ada stabilisasi harga? (2) Apakah setiap kenaikan harga akan menciptakan inflasi? Pertanyaan yang pertama kemungkinan terjadi adanya ketidakmampuan mekanisme pasar menjamin terciptanya keseimbangan harga. Insukindro (136:1993).

Lebih lanjut menurut Insukindro langkah terbaik pengendalian harga adalah didasarkan pada tarik-menarik antara permintaan dan penawarn barang dan jasa. Namun

demikian proses di atas tidak selamanya minus sebab banyak sekali variabel ekonomi dan non ekonomi yang dapat mempengaruhi harga. Jawaban yang kedua adalah menyangkut definisi. Bahwa inflasi adalah “kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus”. Insukindro (1993:136).

Bahwa kenaikan harga satu atau beberapa macam barang pada suatu saat tertentu dan hanya sementara belum tentu menimbulkan inflasi. Di samping itu perlu diamati seberapa besar peranan setiap kelompok barang dari masing-masing komponen yang mempengaruhi inflasi, seperti:

1. Kelompok makanan,
2. Kelompok bahan sandang,
3. Kelompok aneka dan
4. Jasa.

Hasil temuan dari para ahli ekonomi di beberapa negara menunjukkan bahwa penyebab inflasi diantaranya adalah:

1. Volume jumlah uang beredar terlalu besar;
2. Tingkat upah;
3. Krisis energi;
4. Paceklik;

5. Kekeringan;
6. Bencana alam; dan
7. defisit anggaran.

Tetapi tidak satupun dari faktor-faktor tersebut memberi kejelasan secara konsisten sepanjang waktu. Sebagian uang beredar sebagai akibat utamanya (sisi permintaan). Dimana naik turunnya jumlah uang beredar pada ruang domestik negara akan berpengaruh langsung pada laju inflasi di dalam perekonomian pada negara Indonesia.

Tampaknya belum dapat mendeteksi sebagai suatu pengaruh faktor biaya cost dalam membentuk inflasi di Indonesia. Padahal di dalam praktek baik faktor permintaan maupun faktor biaya bekerja secara bersama-sama. Budiono (101:1980).

Faktor jumlah uang beredar (sisi permintaan) dan faktor biaya (disisi penawaran) bekerja secara bersama-sama dalam membentuk inflasi di Indonesia. Namun pada sisi lain bisa pula dikatakan terjadinya sebab akibat antara jumlah uang beredar dengan inflasi dan sebaliknya. Jumlah uang beredar berlebihan karena adanya inflasi atau inflasi terjadi karena jumlah uang beredar berlebihan. Masalah

yang mana lebih dulu timbul antara inflasi dan kenaikan, jumlah uang beredar.

Para pengamat ekonomi tampaknya telah menemukan penyebab utama inflasi adalah jumlah uang beredar (pada sisi permintaan) dimana naik turunnya jumlah uang beredar akan berpengaruh langsung pada laju inflasi di dalam negara Indonesia.

Tapi tampaknya belum dapat mendeteksi pengaruh dari pada faktor-faktor biaya cost terhadap inflasi di dalam negara Indonesia khususnya dari segi pengeluaran untuk mendapatkan sejumlah kelompok barang komoditas. Padahal di dalam praktek, baik faktor permintaan maupun faktor biaya bekerja secara bersama-sama membentuk inflasi di dalam negara Indonesia.

Dari keempat kelompok barang yaitu:

1. Kelompok makanan;
2. Kelompok perumahan;
3. Kelompok sandang; serta
4. Kelompok aneka barang dan jasa.

BAB II

INFLASI

A. Pengertian Inflasi.

Pengertian dari beberapa ahli-ahli ekonomi baik dari dalam negara Indonesia sendiri maupun dari luar negeri diantaranya yaitu seperti pendapat dari pada ahli ekonomi luar negeri Ackley dalam Iswardono (162:1989) mengemukakan bahwa inflasi adalah suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang-barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat).

Selanjutnya yaitu menurut pendapat dari ahli ekonomi yaitu Budiono (97:1982) mengemukakan bahwa inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus.

Sedangkan menurut pendapat Faried (113:1992) mendefinisikan bahwa lekah inflator terjadi bila permintaan agregatif melampaui atau lebih besar dari pada tingkat produk nasional netto kesempatan kerja penuh.

Manullang (83:1983) mendefinisikan inflasi sebagai sesuatu keadaan dalam mana terjadi senang tiasa meningkatkan harga-harga pada umumnya, atau suatu keadaan dimana terjadi senantiasa turunnya dari pada nilai uang paa suatu negara.

Hillier (127:1986) mendefinisikan inflasi sebagai berikut: "*Inflation may be definet as the proportionate increase in the price level per period of time*".

Insukindro (136:1993) mendefinisikan inflasi, bahwa inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga satu atau beberapa barang pada suatu saat tertentu dan hanya sementara belum tentu menimbulkan inflasi.

Killick (158:1981) mendefinisikan inflasi sebagai berikut: "*We can define, or a persistent risee in general level of price, or a persistent fall in the general level of price, or a persistent fall in the purobasin power of money.*"

Definisi-definisi tentang inflasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, walaupun dirumuskan dengan kata-kata yang berbeda, pada prinsipnya terkandung makna yang sama. Inflasi adalah suatu keadaan dimana terdapat kecenderungan harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus.

Kenaikan harga dari pada satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain dalam suatu wilayah negara tersebut.

Dari beberapa definisi di atas, selanjutnya masih ada definisi dan model inflasi. Model Laindler dalam Iswardono (67:1988) dapat kita bagi tiga kategori:

1. Pandangan sosiologi mengatakan bahwa inflasi timbul karena adanya kekecewaan masyarakat yang ditunjukkan dengan kerakusan, konflik sosial, demonstrasi (unjuk rasa). Model Pertama Laindler memasukkan “mogok kerja” sebagai salah satu variabel.
2. Pandangan moneter model Laindler mengatakan bahwa laju inflasi di suatu negara ditentukan oleh harapan yang sebagaimana dikemukakan oleh Phillip, yaitu adanya hubungan negatif antara laju inflasi dengan laju pengangguran.
3. Pandangan ekletik merupakan penggabungan antara model sosiologi dengan model moneter.

B. Beberapa Model Inflasi

Model inflasi yang dikemukakan oleh kelompok Brookings yang dipimpin oleh Wiiliam R. Cline lebih bersifat elektik. Dengan menggunakan “*reduce form*” model Herberge mendapat hasil bahwa jalur moneter merupakan salah satu mekanisme transmisi inflasi tahun 1972-1975.

Analisa regresinya menunjukkan bahwa harga impor memainkan peran penting dalam menyalurkan inflasi luar ke dalam perekonomian domestik. Penemuannya juga menunjukkan, bahwa nilai tukar yang luas (*fleksible change rate*) tidak mampu membendung gangguan dari luar terhadap perekonomian domestik.

Maxwell J. Fry menggunakan model kelompok moneter dalam menjelaskan, penyebab inflasi di delapan negara berkembang di Asia dengan menganggap “*the market clearing*” paradigma dalam pasar uang yakni penawaran uang sama dengan permintaan uang.

Penawaran uang yang digunakan adalah M2 yang didefinisikan sebagai uang “(kartal + demand deposit + tabungan dan deposito berjangka)”. Hasil yang di dapat adalah defisit anggaran pemerintah tetap merupakan

penyebab utama inflasi, khususnya di Filipina, sejak tahun 1960-an.

Model Bautista adalah merupakan suatu model dua sektor perekonomian terbuka, dimana harga barang domestik menyesuaikan pasar luar negeri ditentukan secara langsung oleh harga barang di pasar dunia. Dan juga tergantung pada nilai saat ini.

Baustita memasukkan variabel upah sebagai variabel penjelas. Model yang digunakan adalah model ekletik, dimana baik faktor demand pull (moneterist) dan cost push (structuralist) dicoba dianalisis hasilnya dapat disimpulkan bahwa inflasi di Filipina pada dasarnya berhasil dari luar (external origin)

Di samping model-model yang tersebut di atas, masih ada beberapa model yang dikemukakan oleh para ahli di Indonesia di antaranya:

1. Model Iswardono (69:1988), dimana inflasi sebagai fungsi dari:
 - a. Perubahan J.U.B. (? M)
 - b. Perubahan Penawaran Domestik (? S)
 - c. Perubahan Harga di Pasar Dunia (? PM)

Hasil yang didapat dengan menggunakan OLS adalah sebagai berikut: (data yang digunakan antara tahun 1960-1979).

$$\text{CPI} = 35,68 + 1,25 M + 0,81 S + 0,14 PM$$

(6,98) (0,79) (0,80)

$$R^2 = 0,98 ; F = 328,72 ; DW = 1,47 ;$$

2. Model Budi Gadjah (1985) dengan menggunakan data tahun 1969/70 -1891/82 adalah:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, \dots, X_{10})$$

Y = perubahan C.O.L

X1 = perubahan J.U.B

X2 = perubahan Harga Valuta Asing

X3 = perubahan Ekspor dengan Minyak

X4 = Perubahan Pajak Langsung

X5 = Perubahan Pajak Tidak Langsung

X6 = Perubahan Penerimaan Bukan Pajak

X7 = Perubahan Bantuan Luar Negeri

X8 = Perubahan Pembayaran Hutang

X9 = Perubahan Belanja Pegawai

X10 = Perubahan Belanja Barang

Hasil Yang didapat adalah :

$$Y = -6,47 + 1,006X_1 - 0,06X_2 + 0,64X_3 - 1,12X_4 + 0,26X_5$$

$$(2,72) (-0,69) (4,24) (-3,17) (2,38)$$

$$-0,03X_6 - 0,64X_7 - 0,02X_8 + 0,056X_9 - 0,10X_{10}$$

$$(-1,83) (-0,08) (-1,35) (2,32) (-0,79)$$

$$R^2 = 0,79 ; E = 7,486 ; DG_i = 2,71$$

3. Model Heru Priyadi (1986) dengan data tahun 1969/70-1983/84 adalah:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4)$$

$$Y = \text{Perubahan C.O.L (persen)}$$

$$X_1 = \text{Perubahan J.U.B}$$

$$X_2 = \text{Perubahan Worket Price (persen)}$$

$$X_3 = \text{Perubahan Penerimaan Pemerintah dari Pajak tidak langsung (persen)}$$

$$X_4 = \text{Perubahan Pengeluaran Pemerintah}$$

Hasilnya adalah :

$$Y = -18,16 + 0,38X_1 + 1,12X_2 + 0,41X_3 + 0,024X_4$$

$$(2,074) (1,94) (2,93) (0,260)$$

$$R^2 = 0,84 ; F = 5,57 ; DW = 1,06.$$

4. Model Tadjudin Parenta (1983) dengan menggunakan data tahun 1960-1980 adalah :

$$P = BO + B_1 M + B_2 Y + B_3 PI + E$$

P = Perubahan C.O.L (persen)

M = Perubahan J.U.B (persen)

PI = Perubahan Harga Barang Impor (Rupiah)

Y = Perubahan Penawaran Domestik

Hasil Yang diperoleh adalah sebagai berikut =

$$P = 5,573 + 1,448 M - 5,73 Y + 0,08 PI \cdot \\ (8,455) (-2,0118) (0,375)$$

$$R^2 = 0,983 ; F = 212,02 ; DW = 2,780.$$

Dari hasil perhitungan berbagai model di atas menunjukkan bahwa penyebab utama inflasi adalah faktor J.U.B. Naik turunnya J.U.B. Naik turunnya J.U.B. akan berpengaruh langsung terhadap laju inflasi. Besar kecilnya pengaruh tergantung dari data yang digunakan.

C. Jenis Inflasi

Pada umumnya gejala suatu peristiwa inflasi pada sebuah negara dapat digolongkan dengan menjadi tiga (3) jenis yaitu diantaranya menurut dari Boediono dan Sinungan. Boediono (93-101: 1980) dan Sinungan. (50-53:1987):

1. Atas Dasar "Parah" Tidaknya Inflasi

Penggolongan yang didasarkan atas "parah" atau tidaknya inflasi, dibedakan menjadi beberapa jenis:

- a. Inflasi ringan (di bawah 10% setahun)
- b. Inflasi sedang (antara 10% - 30% setahun)
- c. Inflasi berat (antara 30% - 100% setahun)
- d. Hiperinflasi (diatas 100% setahun).

Menurut Sinungan (1987:51) penentuan parah tidaknya inflasi sangat relatif, tergantung dari selera untuk menamakannya. Sebetulnya dalam menentukan parah tidaknya suatu inflasi tidak cukup hanya dilihat dari satu segi laju inflasi saja, tanpa mempertimbangkan adalah siapa yang menanggung beban atau memperoleh keuntungan dari inflasi tersebut.

Kalau seandainya laju inflasi adalah 20% dan semuanya berasal dari kenaikan harga barang-barang kebutuhan golongan berpenghasilan rendah, maka inflasi tersebut sebenarnya termasuk inflasi yang parah (memprihatinkan).

Ada indikasi dari beberapa pemerhati masalah ekonomi di Indonesia, seperti Parenta (4-8:1991), Widioatmodjo (4-5:1991), Arief (4-5:1990), bahwa

negara-negara berkembang ada semacam konsensus dikalangan pembuat kebijaksanaan ekonomi untuk menerima tingkat inflasi yang dianggap ringan, artinya tidak berbahaya terhadap proses pembangunan ekonomi. Tingkat inflasi tersebut adalah berkisar sebesar 5-10% pertahun.

Lebih lanjut dikatakan oleh Arief (4-5:1990) bahwa tingkat dari pada inflasi sebesar 5-10% ini dipercaya akan merangsang kegiatan investasi sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tanpa menimbulkan keadaan ketidak-seimbangan yang mengganggu kewajaran proses ekonomi di dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional pada negara Indonesia.

Pemerintah negara Indonesia dimana dalam melaksanakan pembangunan ekonomi sebagai pemegang otoritas kebijakan secara fiskal berkenaan dengan pembangunan ekonomi nasional. Senantiasa terus berupaya untuk senantiasa menjaga supaya nilai laju inflasi selama setahun tidak lebih dari satu digit atau kurang dari 10%.

2. Atas Dasar Sebab Awal dari Inflasi

Atas dasar sebabnya, inflasi dibedakan menjadi dua jenis:

- a. Inflasi yang timbul karena masyarakat meminta barang lebih banyak dari biasa disediakan oleh perekonomian, atau juga dengan bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pereetakan uang baru, atau karena meningkatnya permintaan luar negeri, sehingga harga naik “*Demand - pull inflation*”.
- b. Inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi. Bila ongkos produksi naik, misalnya dengan kenaikan harga-harga sarana produksi atau karena adanya tuntutan kenaikan upah buruh, maka kenaikan ongkos produksinya ini akan secara langsung menaikkan harga jual bahan atau barang tersebut Cost - push inflation.

Kedua jenis inflasi ini jarang sekali dijumpai dalam praktek dalam bentuknya yang murni. Pada umumnya inflasi yang terjadi diberbagai negara di dunia adalah kombinasi dari kedua jenis inflasi tersebut. Dari

kedua jenis inflasi tersebut dan seringkali keduanya saling kuat Boediono, (101:1980).

3. Atas Dasar Asal dari Inflasi

Di sini suatu peristiwa inflasi dibedakan menjadi dua buah diantaranya sebagai berikut:

- a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri. Ini dapat terjadi karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dan pencetakan uang baru, atau juga karena panen yang gagal, sehingga jumlah barang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang diminta oleh masyarakat.
- b. Inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi ini dapat terjadi karena naiknya harga-harga (inflasi) di luar negeri di negara-negara yang menjadi langganan dagangan. Kenaikan harga barang-barang yang diimpor bisa berakibat naiknya biaya hidup di dalam negeri, baik langsung melalui kenaikan barang impor, itu sendiri, maupun secara tidak langsung melalui kenaikan ongkos produksi dan harga jualnya.

4. Penelitian Sebelumnya di Indonesia

Beberapa pengamat ekonomi, melakukan analisis inflasi di dalam negara Indonesia dalam upaya

mengetahui faktor-faktor penyebab atau proses terjadinya inflasi di Indonesia.

Iswardono dalam Iswardono (175:1960), menganalisis pengaruh jumlah uang beredar, perubahan penawaran nasional (Produk Domestik Bruto + Ekspor - Impor), perubahan harga di pasar dunia terhadap inflasi di Indonesia. Data yang digunakan meliputi periode 1960-1979. Hasil analisisnya membuktikan bahwa jumlah uang beredar merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap inflasi di Indonesia.

Parenta dalam Iswardono (176:1989) melakukan pengujian kembali atas temuan Iswardono, dengan analisis data dari tahun 1960 hingga 1980. Dalam hasil analisisnya membuktikan bahwa jumlah uang beredar, tetap merupakan faktor yang dominan pengaruhnya terhadap inflasi di Indonesia.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua hasil analisis pakar tersebut di atas adalah bahwa penyebab utama inflasi di Indonesia adalah jumlah uang beredar (yaitu sisi permintaan), dimana naik-turunnya jumlah uang beredar akan berpengaruh langsung terhadap laju inflasi di Indonesia.

Hasil kajian inflasi oleh kedua penulis di atas tampaknya belum dapat mendeteksi pengaruh faktor biaya cost terhadap inflasi di Indonesia, padahal menurut Boediono (1980), di dalam praktek, baik faktor permintaan maupun faktor biaya bekerja secara bersama-sama terhadap inflasi di Indonesia.

Tjipto Herijanto, P., B. Triyoso, dan R. R. E. Capit (1984), mencoba untuk memperoleh jawaban yang lebih lengkap untuk sifat-sifat inflasi dan faktor-faktor yang dominan sebagai penyebab inflasi. Berpijak pada teori tentang sebab awal inflasi, yaitu inflasi karena tarikan permintaan dan karena dorongan biaya, dilakukan analisa inflasi di Indonesia.

Kelompok pengamat Tjipto Herijanto menganalisis hubungan antara inflasi dan produk domestik Bruto, antara inflasi dan jumlah uang beredar, untuk menelusuri faktor-faktor penyebab timbulnya inflasi dari sisi permintaan “*demand-pull inflation*”. Dengan menggunakan data selama Januari 1980 - Juni 1984, diperoleh hasil bahwa pertambahan jumlah uang beredar dan pertambahan permintaan “*agregat*” berpengaruh terhadap inflasi.

Dari sisi “*cost-push inflation*”, yang menelusuri faktor penyebab inflasi dilakukan kelompok pengamat dengan melihat hubungan antara inflasi dan angka indeks impor, antara inflasi dan angka indeks perdagangan besar. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa naiknya harga barang-barang impor secara langsung berpengaruh terhadap, inflasi di Indonesia.

Pengaruh dorongan biaya terhadap inflasi semakin kuat jika dilihat dari pengaruh perkembangan indeks harga perdagangan besar terhadap inflasi, dimana harga barang impor merupakan salah satu komponen pembentuk indeks harga perdagangan besar. Jadi naiknya harga perdagangan besar mendorong naiknya laju inflasi.

Dengan diperolehnya pola kecenderungan tersebut di atas maka simpulan umum kajian inflasi di Indonesia oleh kelompok ini selama periode Januari 1980-Juni 1984 dapat dijelaskan sebagai berikut: Kedua Jenis inflasi baik “*demand-pull inflation*” maupun “*cost-push inflation*” telah bekerja secara bersama-sama.

Hasil analisis yang telah dilakukan oleh para pengamat terdahulu tampaknya belum dapat

memuaskan pengamat-pengamat lain, yang juga tertarik untuk mengamati perilaku inflasi di dalam negara Indonesia.

Ketidak-puasan mereka terletak pada penekanan pengaruh satu arah saja bahwa penambahan jumlah uang beredar berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia, dan bukan sebaliknya. Bukti-bukti mengenai adanya kausalitas dua arah antara jumlah uang beredar dengan tingkat harga-harga umum, yaitu jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat harga umum, tingkat harga umum mempengaruhi jumlah uang beredar dapat dijumpai dari berbagai tulisan antara lain.

Parikh dalam Arief (4-5:1990), melalui pengamatan data selama periode 1969-1980, menemukan adanya kausalitas dua arah antara jumlah uang beredar dengan tingkat harga umum di dalam negara Indonesia.

Studi yang baru saja diselesaikan oleh Arief (4-5:1990) dengan mengamati data selama periode 1969-1989 memberikan konfirmasi terhadap hasil temuan Parikh. Adanya kausalitas dua arah antara jumlah uang beredar dan tingkat harga umum dapat dijadikan petunjuk bahwa sebenarnya tesis strukturalist, “bahwa

jumlah uang beredar adalah akibat dari proses inflasi yang sudah berjalan”. Bukan akar penyebab inflasi, juga tidak benar. (Arief, 4-5:1990).

Aghevli dan Khan dalam Iswara dan Nopirin (229:1986), yang menganalisa data selama periode tahun 1951-1972, menyimpulkan bahwa tingkat inflasi cenderung menaikkan “*nominal expenditure*” pemerintah lebih cepat dari “*revenue*”, akibatnya ialah suatu “*budget deficit*”. Hal ini menimbulkan kebijaksanaan untuk meningkatkan “*money supply*” yang bersal dari pinjaman pada Bank Sentral, bank-bank umum atau dari luar negeri, dan pada gilirannya mengakibatkan kenaikan inflasi. Jadi pertambahan jumlah uang beredar adalah konsekuensi inflasi pada suatu negara.

Mengamati hasil-hasil analisis yang sudah dilakukan oleh parah pengamat inflasi di Indonesia, terlihat bahwa faktor-faktor apa sebenarnya yang dominan pengaruhnya terhadap inflasi, atau bagaimana sebenarnya proses terjadinya inflasi, ternyata masih kabur.

Faktor-faktor penyebab atau proses terjadinya inflasi di Indonesia tetap merupakan teka-teki yang belum terpecahkan, ini tantangan bagi peneliti lain untuk terus mencoba mengkaji perilaku inflasi di Indonesia dengan berbagai pendekatan baru, atau melalui penyempurnaan pendekatan yang sudah ada, dengan harapan diperolehnya temuan-temuan baru yang lebih akurat.

Pendekatan analisis inflasi yang menyerupai pendekatan dekomposisi dilakukan oleh Widioatmodjo (4-5;1991) telaahannya tentang inflasi di Indonesia dilakukan dengan cara mengamati fluktuasi inflasi dan prosentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) per kelompok barang dari bulan ke bulan selama tahun 1990, dikaitkan dengan kebijaksanaan ekonomi yang diambil pemerintah Indonesia.

Hasil kajiannya adalah bahwa kebijaksanaan pemerintah, antara lain mengadakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Pengaruh penyesuaian harga BBM, diamati dari perubahan laju inflasi dan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK), kelompok barang pada

bulan dimana harga BBM yang baru mulai di berlakukan. Atau pada bulan-bulan sesudahnya.

Akan tetapi berapa sebenarnya andil dari perubahan harga BBM, yang tercermin melalui perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) kelompok barang, terhadap inflasi di negara Indonesia? Belum terungkap di dalam kajian Widiatmodjo.

Dengan metode dekomposisi sebagian andil tersebut akan bisa ditelusuri, Jika inflasi umum diuraikan ke dalam jenis barang dan jasa yang tercakup di dalam keranjang barang Indeks Harga Konsumen (IHK), dimana premium dan minyak tanah merupakan jenis-jenis BBM yang tercakup didalamnya (diagram timbangan). Akan tetapi di dalam penulisan ini dekomposisi hanya sampai pada kelompok barang.

D. Pembagian Wilayah Indonesia KTI dan KBI

Memasuki tahun kedua Pelita V, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 1990/1991 di depan sidang Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada awal Januari 1990.

Presiden menegaskan bahwa prioritas tinggi diberikan untuk membangun wilayah Indonesia bagian Timur. Jelas ada kesenjangan antara IBT dan IBB. Mulailah ramai dibicarakan dan didiskusikan tentang KBI dan KTI, dengan sudut pandang profesi yang berbeda-beda. Timbul pertanyaan, propinsi-propinsi mana saja yang termasuk dalam KBI dan KTI?

Sejak isu pembangunan yang mempersoalkan ketimpangan antar wilayah Indonesia Barat dan Timur muncul di Permukaan, berbagai definisi tentang KTI atau IBT pernah dikemukakan. Dua diantaranya yang terpenting adalah:

1. pertama, pembedaan pembangunan atas dasar pencapaian perkembangan ekonomi, dan
2. kedua, pembedaan yang lebih sederhana, yakni pembagian Timur dan Barat atas dasar pembelahan waktu, yang selama ini berlaku, dengan menganggap daerah-daerah yang termasuk waktu Indonesia Barat sebagai KBI dan daerah-daerah waktu Indonesia Tengah dan Timur sebagai KTI (Haris, 40:1994).

Lebih lanjut Haris mengatakan pembedaan yang pertama mengelompokkan Jawa (termasuk Madura), Bali dan Sumatra sebagai daerah-daerah yang secara ekonomi

relatif telah berkembang karena itu dimasukkan ke dalam KBI, dan wilayah di luar itu sebagai KTI (lihat juga Kompas 1989) Sedangkan perbedaan kedua memilih Jawa, Bali, Sumatra dan Kalimantan yang berbeda pada wilayah Waktu Indonesia Barat sebagai KBI, dan daerah-daerah sisanya, waktu Indonesia Tengah dan Timur, sebagai KTI.

Identifikasi-identifikasi itu tidak dipakai di sini, karena kedua-duanya mengabaikan istilah KTI dan KBI sebagai konsep geografis. Sebab, membiarkan istilah-istilah itu semata-mata sebagai konsep ekonomi, barangkali akan cenderung rancu, karena di wilayah Sumatera dikatakan maju pun, sekurang-kurangnya masih terdapat Bengkulu, dan Kalimantan, masih ada Kalimantan Tengah yang relatif tertinggal. Disamping itu memasukkan perbedaan kedua, barangkali akan mengundang lahirnya interpretasi yang cenderung politis mengenai KTI. (Haris, 40:1994)

Menurut Haris (41:1994) berdasarkan geografis, yaitu daerah-daerah yang berada di sebelah Timur Kalimantan dan Bali. Atau kalau ditarik garis lurus dari Utara ke Selatan, KTI adalah wilayah Indonesia yang berada di sebelah Timur Selat Makassar dan Selat Lombok. Ini berarti bahwa wilayah KTI meliputi sembilan propinsi, yaitu empat

propinsi di Sulawesi (Selatan, Tengah, Utara dan Tenggara), tiga propinsi di Nusa Tenggara (NTB, NTT, dan Timor-Timur), serta Maluku dan Irian Jaya.

Menurut Qazuini (5:1990), yang dimaksud dengan Indonesia Bagian Timur adalah wilayah Republik Indonesia yang secara geografis terletak di sebelah Timur Selat Lombok dan Selat Makassar. Kedua Selat tersebut menurut Goodnight dalam Qazuini, (5:1990) sering disebut garis Wallace atau Wallace Line.

Alala dalam Qazuini (5;1990) mengemukakan juga bahwa kawasan Indonesia Bagian Timur terletak di sebelah Timur 116⁰ Bujur Timur, meliputi semua propinsi di Sulawesi serta propinsi-propinsi di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Timor-Timur, Maluku dan Irian Jaya, yaitu semua propinsi di sebelah Timur dari Wallace Line.

Begitu juga pembagian yang dibuat oleh beberapa pengamat lain seperti: Panetto (12:1990), Adisasmita (4-6:1990), Kafiar (9:1990), Natsir (32:1992) menunjukkan pola pembagian yang sama. Menurut pengamat-pengamat di atas, propinsi-propinsi yang termasuk KTI adalah: NTB, NTT, Timor-Timur, semua propinsi di Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya. Sedang yang termasuk KBI adalah semua propinsi di Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Bali.

BAB III

RUANG ONSERVASI

A. Penentuan Daerah

Penentuan daerah yang dikaji dalam buku ini yaitu meliputi wilayah Indonesia yang terdiri atas 17 kota-kota besar, yaitu Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Ujung Pandang, Manado, Ambon dan Jayapura. Alasan pemilihan daerah-daerah tersebut sebagai sampel, ialah karena sejak tahun 1979 ke-17 kota tersebut dijadikan sebagai dasar perhitungan inflasi di dalam negara Indonesia.

Dalan penganalisaan perilaku inflasi, kota-kota tersebut dikelompokkan menjadi KTI dan KBI. Kota-kota di KTI adalah kota Ujung Pandang, Manado, Ambon, Mataran, Kupang dan Jayapura. Sedangkan yang dimaksud dengan Kota-kota di KBI diantaranya adalah Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang

Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Pontianak dan Banjarmasin.

Tujuan pengelompokkan ini adalah untuk memperoleh kejelasan tentang perilaku inflasi yang terjadi di dalam negara Indonesia, jika memang terdapat perbedaan perilaku inflasi antara kedua wilayah tersebut.

Data yang digunakan dalam buku ini adalah data sekunder yang diperoleh dari lembaga atau instansi dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data bulanan meliputi:

- Laju inflasi gabungan 17 kota di Indonesia (April 1985 - Maret 1995 = 100) dari bulan Januari 1985 - sampai dengan Juni 1995.
- Laju inflasi perkota di 17 kota di Indonesia (April 1985- Maret 1978 = 100) dari bulan Januari 1979 sampai dengan Desember 1989.
- Angka Penimbang kota untuk menghitung andil kelompok barang di masing-masing kota terhadap inflasi umum.
- Pengeluaran konsumsi perbulan, perkelompok barang, untuk menghitung andil kelompok barang terhadap inflasi umum, dari bulan Januari 1979 sampai dengan Desember 1989.

Sumber data adalah:

- Biro Pusat Statistik, Jakarta;
- Kantor Perwakilan BPS Yogyakarta dan Ujung Pandang;
- Berbagai majalah ilmiah, jurnal, surat kabar, buletin dan laporan resmi berbagai instansi.

Teknik pengumpulan data adalah: (1) Korespondensi dengan kepala bagian statistik Harga konsumen, Biro Pusat Statistik Jakarta, pada saat yang bersangkutan tidak ada di tempat, (2) wawancara dengan kepala-kepala kantor wilayah, kepala cabang, kepala perwakilan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, dan (3) studi kepustakaan.

B. Analisa Onservasi Inflasi

1. Metode Dekomposisi

Untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam penelitian ini, maka lebih dulu memilih model dasar yang tepat untuk digunakan dalam studi empiris. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh BPS.

Data yang sudah terkumpul akan dianalisa dengan metode dekomposisi. Dengan metode ini perilaku inflasi tidak saja dianalisis dari fluktuasi inflasi umum,

tetapi juga dari fluktuasi inflasi kelompok barang, sebab analisis perilaku inflasi dengan mengamati fluktuasi inflasi umum saja, belum cukup mendapatkan keterangan tentang perilaku dan sumber-sumber inflasi yang sesungguhnya.

Seharusnya diamati pula fluktuasi dan pola sumbangan, paling kurang, kelompok barang yang merupakan komponen-komponen pembentukan inflasi umum. Alasannya, efek dari sumber-sumber inflasi yang berpengaruh terhadap perilaku inflasi, bekerja selalu kelompok barang.

Jika sumber inflasi berasal dari kelompok barang yang bobotnya besar, maka efeknya terhadap inflasi umum akan besar pula. Sebaliknya jika sumber inflasi berasal dari kelompok barang yang bobotnya kecil, maka efeknya terhadap inflasi umum akan kecil pula. Rarismawan (23: 1990).

Selanjutnya keajegkan pola hubungan antara tiga aspek inflasi yaitu sebagai berikut:

1. fluktuasi inflasi umum,
2. fluktuasi inflasi,
3. kelompok barang dan pola sumbangan kelompok barang terhadap inflasi umum)

Disamping itu kegiatan ekonomi pemerintah dan swasta diduga sebagai sumber inflasi, dari waktu ke waktu, dapat dijadikan keterangan tentang pola perilaku inflasi. Maksudnya, dari keajegkan atau tidak dapat diambil kesimpulan tentang pengaruh kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut inflasi.

Metode dekomposisi pada umumnya mencoba mengidentifikasi 3 komponen secara terpisah sebagai pola dasar yang menggambarkan karakteristik ekonomi dan bisnis sepanjang waktu tertentu. Vincent G. (16-18: 1990) Ketiga komponen (syclical), dan faktor musiman (seasonal factor). Trend menggambarkan perilaku data dalam jangka panjang yang dapat bersifat menaik, menurun atau tidak berubah.

Faktor siklik menggambarkan naik turunnya ekonomi atau industri tertentu dan umumnya yaitu seperti:

1. Deret data GNP (Gross National Product),
2. Indeks produksi industri,
3. Perkembangan harga,
4. Tingkat bunga,
5. Penawaran uang,

6. Tingkat inflasi dan sebagainya.

Faktor musiman berkaitan dengan fluktuasi periodik yang relatif konstan dan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut;

1. temperatur,
2. curah hujan,
3. bulan-bulan tertentu dalam setahun, yang berkaitan dengan hari raya, upacara keagamaan, dan sebagainya.

Perbedaan faktor musiman dan siklik adalah bahwa pengaruh musiman, berulang pada interval waktu yang tetap sepanjang tahun, bulan atau minggu, sedangkan faktor siklik tidak bersifat tetap dalam arti dapat bervariasi dari satu siklus ke siklus lain.

Metode dekomposisi menganggap bahwa data yang muncul adalah disebabkan:

$$\begin{aligned}\text{Data} &= \text{Pola(model)} + \text{Galat(error)} \\ &= f = (\text{trend, siklik, musim}) + \text{galat}\end{aligned}$$

Konsep dasar dari metode dekomposisi adalah pertama memisahkan secara empirik pengaruh dari faktor musim, kemudian pengaruh trend, dan terakhir adalah pengaruh siklik. Faktor galat yang tidak lain

merupakan sisaan (selisih antara data aktual dan model) tidak dapat diperkirakan tetapi dapat diidentifikasi.

Secara umum model matematik dari pendekatan dekomposisi adalah:

$$Y_t = f(I_t, T_t, C_t, E_t) \dots \dots \dots (3.1)$$

dimana:

- Y_t = nilai deret waktu (data aktual) pada periode t
- I_t = komponen atu indeks musiman pada periode t
- T_t = komponen trend pada periode t
- C_t = komponen siklik pada periode t
- E_t = komponen galat pada periode t

Bentuk dari fungsi (3.1) menjadi fungsi (3.2).

Berikut:

$$Y_t = I_t + T_t + C_t + E_t \dots \dots \dots (3.2)$$

Langka untuk penyelesaian tahap fungsi (2) berdasarkan metode dekonposisi adalah:

- a. Data dari aktual Y_t , tentukan rata-rata bergerak (moving average) 12 bulan. Tujuannya untuk memperoleh dugaan dari pengaruh trend (T_t) dan siklik (C_t). Dengan demikian akan diperoleh:

$$M_t = T_t + C_t \dots \dots \dots (3.3)$$

- b. Untuk memperoleh pengaruh musin (I_t), maka kurangkan fungsi (3.2) terhadap fungsi (3.3) akan diperoleh:

$$(Y_t - T_t) = I_t + E_t \dots \dots \dots (3.4)$$

- c. Identifikasi pengaruh trend yang sesuai dengan data (apakah linear, eksponensial, kuadratik, dan lain-lain) dengan menggunakan metode kuadrat terkecil sebagai halnya pada model regresi. Dalam hal ini akan diperoleh T_t .

- d. Untuk mendapatkan pengaruh siklik (C_t), maka kurangkan persamaan (3.3) terhadap T_t , sehingga diperoleh:

$$(M_t - T_t) = C_t \dots \dots \dots (3.5)$$

- e. Untuk keperluan peramalan, maka gunakan ketiga faktor yang telah dipisahkan tersebut, sebagai berikut:
- f. Selisih antara data aktual (Y_t) dan nilai yang diduga (T_t) menunjukkan pengaruh galat (E_t), dengan demikian diperoleh:

Nilai f galat (E_t) dapat digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan model dekomposisi.

Dalam buku ini, hanya beberapa kegiatan ekonomi akan ditelusuri, yaitu:

- a. Kegiatan-kegiatan ekonomi pemerintah:
 - 1) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dimulai setiap 1 April.
 - 2) Kebijakan penyusunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
 - 3) Kebijakan devaluasi Rupiah;
- b. Kegiatan Ekonomi Swasta;
 - 1) Pengeluaran-pengeluaran khusus untuk menyambut dan merayakan peristiwa-peristiwa atau hari raya keagamaan yang penting, seperti Puasa, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.

Sumber inflasi di luar sumber-sumber ini tidak dapat dipantau, terhubung terbatasnya informasi yang bisa diperoleh dalam dokumen resmi dari berbagai instansi juga karena terbatasnya waktu yang tersedia.

Selain dekomposisi menurut kelompok barang, mengingat Indonesia merupakan kepulauan, dimana penduduk di setiap pulau mempunyai karakteristik tersendiri, dalam pola pengeluaran yang diduga akan mempengaruhi perilaku inflasi

di masing-masing wilayah. Maka juga dilakukan analisis dekomposisi inflasi menurut wilayah.

Yang akan dibedakan adalah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (RBI). Jika terdapat perbedaan perilaku dan pola sumbangan kelompok barang antara KTI dan RBI, akan dapat pula dijadikan pedoman bagi kejelasan perilaku inflasi di Indonesia (gabungan 17 kota di Indonesia).

2) Kelebihan dan Kelemahan Dekomposisi:

- a) Biaya lebih murah, karena kualitas (jumlah barang/jasa) yaitu ditetapkan sebagai paket timbangan, tidak perlu disurvei setiap periode melainkan sekali saja, yaitu kualitas periode dasar. Yang perlu dikumpulkan adalah perubahan harganya dari waktu ke waktu. Dengan menerbitkan Indeks Harga Konsumen (IHK) akan memakan waktu sedikit yang akan lebih tepat waktu, dibanding dengan menerbitkan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang berdasarkan timbangan paket barang pada periode yang sedang berjalan. Kelemahannya adalah:

b) Penggunaan periode dasar yang ditetapkan terlalu lama, sesuai dengan asumsi "Laspeyers": Menganggap peranan relatif setiap barang/jasa yang dikonsumsi tidak berubah. Jadi penggunaan periode dasar untuk jangka pendek sampai menengah (kurang lebih 5 tahun). Lebih dari ketetapan tersebut pasti terjadi perubahan yang relatif besar dalam peranan relatif dari setiap barang dan jasa.

2. Rumus Perhitungan inflasi Negara Indonesia

Rumus guna untuk menghitung inflasi umum di negara Indonesia:

$$I(n) = \sum_{k=1}^{17} [I_k(1) \times B_k] \dots \dots \dots (3.8)$$

$$I_k(n) = \sum_{k=1}^4 [I_{i.k}(n) \times W_{i.k}(n-1)] \dots \dots \dots (3.8a)$$

$$I_{i.k}(n) = I H K_{i.k}(n) \dots \dots \dots (3.8b)$$

3. Rumus untuk inflasi kelompok barang di Indonesia:

$$I_i(n) = \sum_{k=1}^{17} [I_{i.k}(n) \times B_k] \dots \dots \dots (3.9)$$

4. Rumus untuk menghitung andil kelompok barang pada inflasi umum di Indonesia:

$$A_i(n) = \sum_{k=1}^{17} [I_{i.k}(n) \times W_{i.k}(n-1) \times B_k] \dots \dots \dots (3.10)$$

$$FA_i(n) = \frac{A_i(n)}{I(n)} \times 100\% \dots \dots \dots (3.10a)$$

Dimana:

$I(n)$ = Inflasi umum di Indonesia pada bulan ke-n;

$I_{i.k}(n)$ = Inflasi umum di kota k, pada bulan ke-n;

$I_{i.k}(n)$ = $IHK_{i.k}(n)$ inflasi atau persentase perubahan IHK kelompok barang i, di kota k, pada bulan ke-n;

$I(n)$ = Inflasi kelompok barang i, di Indonesia pada bulan ke-n.

$A_i(n)$ = andil kelompok barang i di Indonesia terhadap inflasi umum di Indonesia pada bulan ke-n;

$Fai(n)$ = persentase kelompok barang i, di Indonesia terhadap inflasi umum di Indonesia pada bulan ke-n;

$W_{i.k}(n-1)$ = nilai relatif pengeluaran konsumen untuk kelompok barang i, terhadap total pengeluaran di kota k, pada bulan n-1, (nilai penimbang diperoleh dengan cara :

$$NK_i.k(n-1) / \sum_{i=1}^4 NK_i.k(n-1), \text{dimana}$$

$NK_i.k(n-1)$ adalah pengeluaran konsumen untuk membeli jumlah kelompok barang i , periode dasar dengan harga pada bulan $n-1$ di kota k ;

B_k = bobot kota k , diukur sebagai rasio jumlah rumah tangga di kota k , terhadap jumlah rumah tangga gabungan 17 kota di Indonesia

i = 1, 2, 3, 4 (kelompok bahan: makanan, perumahan, sandang, aneka barang dan jasa)

k = 1, 2, 3, 17 (jumlah kota yang diamati: Mataram sampai dengan Jakarta);

n = bulan

$\wedge$ = Simbol untuk laju pertumbuhan dari suatu variabel.

5. Rumus Perhitungan Untuk KTI dan KBI

Untuk membandingkan tingkat inflasi dan pola sumbangan kelompok barang terhadap inflasi antara KTI dan RBI, terlebih dahulu dicari inflasi perbulan

untuk KTI dan RBI, mulai bulan Januari 1985 sampai dengan Juli 1995.

a. Rumus untuk mendapatkan inflasi perbulan:

$$I^0(n) = \sum_{k=1}^n [I_k(n) \times B^0 k] \dots \dots \dots (3.11)$$

$$I_k(n) = \sum_{k=1}^4 [I_{i.k}(n) \times W_{i.k}(n-1)] \dots \dots \dots (3.8a)$$

$$I_{i.k}(n) = I_{HKi} \cdot k(n) \dots \dots \dots (3.8b)$$

b. Rumus untuk menghitung inflasi kelompok barang:

$$I^0_i(n) = \sum_{k=1}^n [I_{i.k}(n) \times B^0 k] \dots \dots \dots (3.12)$$

c. Untuk menghitung andil kelompok barang terhadap inflasi dihitung dengan rumus :

$$A^0_i(n) = \sum_{k=1}^n [I_{i.k}(n) \times W_{i.k}(n-1) \times B^0 k] \dots \dots \dots (3.13)$$

$$FA^0_i(n) = \frac{A^0_i(n)}{I^0(n)} \times 100\% \dots \dots \dots (3.13a)$$

Dimana:

$I^0(n)$ = Inflasi umumpada bulan ke-n;

$I^0_i(n)$ = Inflasi kelompok barang i, pada bulan ke-n

$A^0_i(n)$ = Andil kelompok barang i, terhadap inflasi umum di KTI pada bulan ke-n;

$FA^0_i(n)$ = Persentase kelompok barang i, terhadap

inflasi umum pada bulan ke-n.

$B^{\circ}k$ = bobot kota k,

k = 1,2,3, ... 17 (Mataram – Jakarta)

i = Makanan, perumahan, sandang dan aneka barang dan jasa.

n = Jumlah daerah untuk KTI dan KBI

6. Analisis Varian

Setelah angka inflasi di RBI, RBI ditemukan, selanjutnya menarik untuk mengetahui apakah ada atau tidakperbedaan yang signifikan dalam tingkat inflasi dan pola sumbangan kelompok barang terhadap inflasi, antara KTI, dan KBI~" serta KBI~~. Hal ini dapat diuji dengan analisis varians. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketiga kelompok di atas berasal dari satu populasi, atau apakah populasi dasar, dari mana ketiga kelompok di atas diambil, mempunyai varian yang sama. Moroney (233:1990)

Hipertesis yang diuji adalah bahwa varian dari ketiga populasi itu sama, dengan anggapan bahwa:

$$H_0 : \sigma_0^2 = \sigma^{\sim 2} = \sigma^{\sim\sim 2} \dots\dots\dots(3.14)$$

Dimana:

H_0 = hipotesa nol;

σ^2 = varian populasi

σ^2 = varian papulasi

σ^2 = varian populasi

Setelah hipotesis nol dinyatakan, selanjutnya dicari F-hitung, yang Merupakan rasio antara varians yang lebih besar “*greater variance estimation*” dan varian yang lebih kecil “*lesser variance estimation*”, dengan menggunakan Metode singkat Moreney, (377:1990).

F-hitung dapat juga dihitung dengan membagi varians antara kelompok “*variance between group*”, dengan menggunakan metode singkat. Horeney (377:1976), Rothari, (139:1978) Nasir (491:1985), Hadi (374:1988).

Hal Itu sesuai dengan esensi dari analisa varians, apakah varians antara kelompok secara significant lebih besar dari varians antar kelompok. Jika sudah jelas varians antar kelompok lebih kecil dari varians dalam kelompok, maka tidak perlu lagi melakukan perhitungan apapun. Dua atau lebih sampel jelas berasal dari satu populasi dasar.

Prosedur untuk menentukan F-hitung dapat diringkas dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel singkat Analisa Varian

Sumber Keterangan	Jumlah Kudrat Keragaman	Derajat Bebas	Varians
Antar Klp	JKKAK	H – 1	$\frac{JKKAK}{h - 1}$
Dalam Klp	JKKDK	R – h	$\frac{JKKDK}{R - h}$
Total	JKKT	R – 1	

$$\begin{aligned}
 F\text{-hitung} &= \frac{\text{Varians yang lebih besar}}{\text{Varians yang lebih kecil}}, \\
 &\quad \text{yang dalam semua hal yang relevan} \\
 &= \frac{\text{Varians antar kelompok}}{\text{Varians dalam kelompok}} \\
 &= \frac{JKKAK}{H - 1} \dots\dots\dots(3.15) \\
 &= \frac{JKKDK}{R - h}
 \end{aligned}$$

Dimana:

JKKAK = Jumlah kuadrat keragaman antar kelompok

$$\begin{aligned}
 &= \left[\frac{\left(\sum_{n=1}^{r_0} X^0 i(n) \right)^2}{r^0} + \frac{\left(\sum_{n=1}^r X^{\sim} i(n) \right)^2}{r^{\sim}} + \frac{\left(\sum_{n=1}^{R^{\sim}} X^{\sim} i(n) \right)^2}{r^{\sim}} \right] \\
 &\quad - FK \quad (3.16)
 \end{aligned}$$

$X_{in} = I_i(n)$ atau $FA_i(n)$

$$FK = \text{Faktor koreksi} = \frac{T_i^2}{R}$$

T_i = Jumlah dari semua variabel $X_{i(n)}$

$$= \frac{\left(\sum_{n=1}^{r_0} X^0_{i(n)} \right)^2}{r^0} + \frac{\left(\sum_{n=1}^r X^{\sim}_{i(n)} \right)^2}{r^{\sim}} + \frac{\left(\sum_{n=1}^{R^{\sim\sim}} X^{\sim\sim}_{i(n)} \right)^2}{r^{\sim\sim}}$$

JKKDK = Jumlah kuadrat keragaman dalam kelompok = JKKT – JKKAK.....(3.17)

JKKT = Jumlah kuadrat keragaman total

$$= \frac{\left(\sum_{n=1}^{r_0} X^0_{i(n)} \right)^2}{r^0} + \frac{\left(\sum_{n=1}^r X^{\sim}_{i(n)} \right)^2}{r^{\sim}} + \frac{\left(\sum_{n=1}^{R^{\sim\sim}} X^{\sim\sim}_{i(n)} \right)^2}{r^{\sim\sim}} -$$

FK(3.18)

r^0 = banyaknya data di KTI

$r^{\sim}$ = banyaknya data di KBI $^{\sim}$

$r^{\sim\sim}$ = banyaknya data di KBI $^{\sim\sim}$

R = Banyaknya data secara keseluruhan

$$= r^0 + r^{\sim} + r^{\sim\sim}$$

i = 1,2,3,4 (makanan, perumahan, sandang, aneka)

h = banyaknya kelompok = 3: (KTI, KBI $^{\sim}$, KBI $^{\sim\sim}$)

Setelah F-hitung diperoleh dari taraf signifikansi. (α) ditentukan, 5% atau 1%, langka selanjutnya ialah membandingkan F-hitung dan F-tabel ($F\alpha$, V_1, V_2 , dimana

V_1 : derajat bebas numerator, dan derajat bebas denumerator. Jika F -hitung lebih kecil atau sama dengan F -tabel, maka H_0 diterima. Sebaliknya, Jika F -hitung lebih besar dari pada F -tabel, maka H_0 ditolak. Jika H_0 ditolak maka dapat dilakukan uji lanjut untuk mengetahui kelompok mana yang mempunyai perbedaan, yaitu satu Z -test atau t -test. Forgiel (585,195:1978).

Sebelum masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab yang menguraikan hasil analisa data untuk menguji hipotesis yang diajukan, didalam bab sebelumnya, terlebih dahulu diuraikan cara-cara perhitungan inflasi di Indonesia atas dasar Indeks Harga Konsumen IHK, serta beberapa catatan tentang penggunaan tahun dasar, April 1977-Maret 1978. Kesemuanya akan diuraikan di dalam Bab IV.

BAB IV

PERHITUNGAN INFLASI NEGARA INDONESIA ATAS DASAR INDEKS HARGA KONSUMEN

A. Perhitungan Inflasi Negara Indonesia

Selama PELITA I dan PELITA II, pemerintah menggunakan Indeks Biaya Hidup (IBH) untuk mengukur laju inflasi di Indonesia. Indeks Biaya Hidup tersebut mewakili 62 jenis barang dan jasa, berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 1957/1958, terhadap rumah tangga-rumah tangga buruh industri di Jakarta. Dasar pengukuran inflasi ini digunakan untuk menghitung inflasi di dalam negara Indonesia dari tahun 1958/1959 - 1978/1979.

Inflasi yang didasarkan atas SBH 1957/1958 tidak dapat lagi digunakan untuk menggambarkan keadaan inflasi di Indonesia yang sebenarnya, karena Jakarta tidak identik dengan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga perlu diadakan perubahan ukuran inflasi yang lebih mencerminkan keadaan inflasi di Indonesia.

Untuk itu Biro Pusat Statistik (BPS) kembali melaksanakan survei Maya hidup tahun 1977 sampai 1978,

dengan tujuan agar diperoleh gambaran tentang pola konsumsi masyarakat di seluruh Indonesia dan paket timbangan (oleh BPS, diistilahkan sebagai diagram timbangan, lihat sebagai contoh lampiran 2) yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan Indeks Harga Konsumsi (IHK) selama periode 1979 sampai 1980 - 1989 sampai 1990.

Survei Biaya Hidup 1977 sampai 1978 dilaksanakan di 17 kota besar yang pada waktu itu dianggap dapat mewakili seluruh kota di Indonesia. Kota-kota tersebut adalah Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Manado, Ujung Pandang, Denpasar, Mataram, Kupang, Ambon, dan Jayapura.

Banyaknya rumah tangga yang dijadikan sampel adalah 15.000 rumah tangga, yang tersebar di 17 kota tersebut di atas. Banyaknya rumah tangga sampel di masing-masing kota tersebut nantinya akan digunakan sebagai penimbang, untuk mendapatkan Indeks Harga Konsumen (IHK) secara nasional (gabungan 17 kota di Indonesia). Banyaknya rumah tangga sampel masing-masing kota dapat dilihat pada lampiran 1.

Banyaknya barang dan jasa yang tercakup dalam Survei Biaya Hidup 1977 sampai 1978 masing-masing kota bervariasi antara 115 - 150 barang dan jasa yang mewakili berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat kota pada waktu itu. Barang dan jasa tersebut dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu:

1. Makanan,
2. Perumahan,
3. Sandang dan
4. Aneka.

Rumus untuk menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah rumus “Laspeyres” yang dimodifikasi, yaitu:

$$IHK_{k(n)} = \frac{\sum_{i=1}^4 \frac{P_{i,k(n)}}{P_{i,k(n-1)}} \cdot \{P_{i,k(n-1)} Q_{i,k(0)}\}}{\sum_{i=1}^4 P_{i,k(0)} Q_{i,k(0)}} \times 100 \dots\dots\dots (12)$$

dimana:

$IHK_{k(n)}$ = Indeks harga konsumen di kota k pada periode ke-n.

$\frac{P_{i,k(n)}}{P_{i,k(n-1)}}$ = Perubahan harga, yaitu rasio antara harga

kelompok barang i di kota k pada bulan ke-n dan harga kelompok barang itu pada bulan ke-(n-1).

$P_{i,k(n)}$ = Harga kelompok barang i di kota k pada bulan ke n .

$P_{i,k(n-1)}$ = Harga kelompok barang i di kota k pada bulan ke- $(n-1)$.

$P_{i,k(n-1)} Q_{i,k(0)}$ = $NK_{1,k(n-1)}$ = Pengeluaran konsumsi di kota k untuk membeli jumlah kelompok barang i periode dasar ($Q_{i,k(0)}$) dengan harga pada bulan ke- $(n-1)$ ($P_{i,k(n-1)}$).

$P_{i,k(0)} Q_{i,k(0)}$ = $NK_{1,k(0)}$ = Pengeluaran konsumsi tahun dasar di kota k untuk kelompok barang i , yaitu $Q_{i,k(0)}$ dengan harga tahun dsasar ($P_{i,k(0)}$).

i = 1,2,3,4 (makannan, perumahan, sandang dan aneka)

k = 1,2, ... 17 (Mataram s/d Jakarta)

n = Bulan

0 = Tahun dasar

Rumus 12 dapat dipakai untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) menghitung kelompok barang i di kota k pada bulan ke- n jika tanda) dihapuskan.

Biro Pusat Statistik menggunakan rumus IHK di atas di dalam menghitung IHK dan laju inflasi Indonesia. Rumus IHK tersebut di atas lengkapnya adalah:

$$\frac{\sum_{i=1}^4 \frac{P_{i,k(n)}}{P_{i,k(n-1)}} \cdot \frac{P_{i,k(n-1)}}{P_{i,k(n-2)}} \dots \frac{P_{i,k(2)}}{P_{i,k(1)}} \cdot \frac{P_{i,k(1)}}{P_{i,k(0)}} \cdot P_{i,k(0)} Q_{i,k(0)}}{\sum_{i=1}^4 P_{i,k(0)} Q_{i,k(0)}} \times 100 \dots\dots(12.a)$$

Kalau dilakukan manipulasi secara matematika terhadap rumus di atas, maka akan didapatkan kembali rumus asli dari “Lespeyres” yaitu:

$$DL = \frac{\sum_{i=1}^4 P_{i,k(0)} Q_{i,k(0)}}{\sum_{i=1}^4 P_{i,0} Q_{i,0}} \times 100$$

dimana:

DL= Indeks harga Laspeyres.

Atas dasar pertimbangan praktis, yaitu supaya tidak lagi mengalikan harga pada periode 1, 2 dan seterusnya secara langsung dengan kuantitas pada periode dasar, Biro Pusat Statistik membuat pengembangan (modifikasi) sehingga diperoleh rumusan baru, yang dinamakan rumus “Laspeyres yang dimodifikasi”

Di Indonesia, baik Indeks Harga Konsumen maupun laju inflasi dihitung setiap bulan. Laju inflasi selama satu tahun diperoleh dengan menjumlahkan laju inflasi bulanan

selama setahun. Berikut ini diberikan contoh perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) maupun inflasi, untuk kota Ujung Pandang. Pertimbangan dipilihnya kota Ujung Pandang sebagai contoh adalah:

- 1) Karena penulis berasal dari kota Ujung Pandang, sehingga akan lebih mudah dilakukan pengambilan data:
- 2) Data yang penulis butuhkan tersedia.

Dalam contoh ini, cara perhitungan Indeks Harga Konsumen dan persentase perubahannya, serta andil setiap kelompok barang terhadap inflasi di Kota Ujung Pandang, terhadap inflasi di Indonesia (gabungan 17 kota), maupun terhadap pembentukan inflasi di KTI, diberikan untuk perumahan saja.

Cara perhitungan untuk kelompok makanan, sandang, aneka barang dan jasa analog dengan cara perhitungan pada kelompok perumahan. Begitu juga untuk kota-kota yang lain cara perhitungannya sama.

Hasil perhitungan tersebut secara ringkas disajikan di dalam tabel 4 berikut. Sumber data dan cara perhitungan setiap kolom di dalam tabel 4 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Perhitungan IHK, Inflasi dan Andil Kelompok Perusahaan
Terhadap Inflasi Umum Kota Ujung Pandang (April 1977 –
Maret 1978 = 100)

Jenis Barang	Kualitas	NK _{2.4(0)} (Apr '77-Mar '78)	NK _{2.4(131)} (Nop.1989)	NK _{2.4(131)} (Des.1989)	IHK _{2.4(131)} (Nop.1989)	IHK _{2.4(132)} (Des.1989)	IHK _{2.4(132)} (Des.1989)	A _{2.4(132)} (Des.1989)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. Biaya Tetap Tinggal		7.510,00	26.746,44	26.758,30	356,14	356,36	0,04	
1. Batu bata	Sedang	875,00	2.305,03	2.305,03				
2. Cat	Glutex	277,00	899,64	899,64				
3. Kayu balokan	Jati	470,00	673,06	673,06				
4. Kontrak rumah	Gabungan	601,00	1.031,48	1.031,06				
5. Paku besi	4,00 CN	723,00	2.773,78	2.773,78				
6. Papan	Meranti	1.380,00	3.378,19	3.378,19				
7. Pasir	Pasang	414,00	1.538,93	1.538,93				
8. Semen	Tonasa	678,00	1.912,61	1.928,47				
9. Sewa rumah	Gabungan	702,00	1.162,93	1.162,93				
10. Tukang bukan Mandor	Tukang batu	1.390,00	11.070,79	11.070,79				
B. Bahan Bakar, Penerangan dan Air		2.740,00	13.888,47	13.888,47	506,88	506,88	-	
11. Bola lampu	Ralin 125 V	105,00	180,87	180,87				
12. Minyak tanah	Eceran	1.313,00	10.345,10	10.345,10				
13. Tarif air minum -1	PPM, tarif	60,00	70,79	70,79				
14. Tarif air minum -2		78,00	180,42	180,42				
15. Tarif listrik	PLN, 250 VA	1.084,00	2.816,71	2.816,71				
16. Korek api (kayu)	Duren	100,00	294,58	294,58				
C. Perlengkapan RT		1.265,00	2.351,28	2.351,28	185,87	185,87	-	
17. Belas minum biasa	Polos	260,00	286,76	286,76				
18. Kasur No.2	Kain kasur	382,00	852,66	852,66				
19. Meja kursi	1 meja 4 kursi	584,00	1.128,67	1.128,67				
20. Mesin jahit lengkap	Standard	39,00	83,19	83,19				
D. Penyelenggaraan RT		2.273,00	7.811,51	7.811,51	343,67	343,67	-	
21. Deterjen Medium	Rinso	392,00	1.787,94	1.787,94				
22. Pembasmi nyamuk	Baygon	172,00	678,55	678,55				
23. Sabun cuci	Sunlight	254,00	750,89	750,89				
24. Upa pembantu RT	Mengirip	1.455,00	4.596,13	4.596,13				
Kelompok Perumahan		13.788,00	50.797,70	50.809,56	368,42	368,51	0,02	0,01
Uman		59.074,00	179.484,53	181.094,79	303,83	300,56	0,90	0,90

Keterangan: IHK_{2.4(n)} = Indeks Harga Konsumen untuk Kelompok Perumahan di kota Ujung Pandang.

NK_{2.4(n)} = Pengeluaran untuk kelompok perumahan di kota Ujung Pandang.

RT = Rumah tangga

2 = Indeks untuk kelompok perumahan

4 = Indeks untuk kota Ujung Pandang

131 = Indeks untuk bulan Nopember 1989

132 = Indeks untuk bulan Desember 1990

0 = Indeks untuk April 1977 - Maret 1978

Sumber: Lampiran 2 dan 3, Sub II.A-D.

Kolom 3 : Pengeluaran konsumsi periode dasar (NK_{2.4(0)}) hasil SBH 1977/1978 diambil dari data pada lampiran 2, sebagai II, kolom 5.

Kolom 4 : pengeluaran konsumsi pada bulan Nopember 1989 diambil dari data lampiran 3, bagian II.A sampai II.D, untuk bulan Nopember 1989, di dalam Tabel 4 diberi simbol (NK_{2.4(131)}). Nilai-nilai ini sebenarnya berasal dari rangkaian perkalian (seperti rumus 12.a) sebagai berikut:

$$\frac{P_{2.4(131)}}{P_{2.4(130)}} \cdot \frac{P_{2.4(130)}}{P_{2.4(120)}} \dots \frac{P_{2.4(2)}}{P_{2.4(1)}} \cdot \frac{P_{2.4(1)}}{P_{2.4(0)}} \cdot P_{2.4(0)} \cdot Q_{2.4(0)}$$

atau

$$\frac{P_{2.4(131)}}{P_{2.4(130)}} \cdot NK_{2.4(130)}$$

dimana:

$$\frac{P_{2.4(131)}}{P_{2.4(130)}} \text{ adalah perbandingan antara harga}$$

bulan Nopember 1989 dan harga bulan Oktober 1989.

Kolom 5 : Pengeluaran konsumsi pada bulan Desember 1989 diambil dari data lampiran 3, bagian

II.A sampai II.D, untuk bulan Desember 1989, dalam tabel 4 diberi simbol $NK_{2.4(132)}$. Nilai-nilai ini dihitung seperti cara menghitung $NK_{2.4(131)}$.

Kolom 6 : Indeks Harga Konsumen untuk bulan Nopember 1989 dicari dengan cara: kolom 4 dibagi kolom 3 dikalikan 100. Secara aljabar (lihat rumus 12.a), dapat ditulis:

$$\frac{\frac{P_{2.4(131)}}{P_{2.4(130)}} \cdot \frac{P_{2.4(130)}}{P_{2.4(129)}} \dots \frac{P_{2.4(2)}}{P_{2.4(1)}} \cdot \frac{P_{2.4(1)}}{P_{2.4(0)}} \cdot P_{2.4(0)} \cdot Q_{2.4(0)}}{P_{2.4(0)} \cdot Q_{2.4(0)}} \times 100$$

IHK kelompok perumahan bulan Nopember 1989 di Ujung Pandang: 368,42. IHK umum bulan Nopember di Ujung Pandang: 303,83.

Kolom 7 : Indeks Harga Konsumen untuk bulan Desember 1989 dicari sesuai dengan cara untuk kolom 6.

Kolom 8 : Persentase perubahan IHK atau laju inflasi bulan Desember 1989, dicari dengan cara: kolom 7 dikurangi kolom 6, kolom dikalikan 100% atau dengan rumus, sebagai berikut:

$$\frac{HK_{2.4(Des'89)} - IHK_{2.4(Nop'89)}}{IHK_{2.4(Nop'89)}} \times 100\%$$

Hasilnya: persentase perubahan IHK kelompok perumahan di Ujung Pandang bulan Desember 1989 adalah 0,02%. Laju inflasi umum di Ujung Pandang bulan Desember 1989 adalah 0,90%.

B. Andil Kelompok Barang Terhadap Inflasi Umum

Andil kelompok perumahan di Ujung Pandang terhadap inflasi umum di Ujung Pandang bulan Desember 1989 dicari dengan cara: persentase perubahan IHK atau inflasi kelompok perumahan di Ujung Pandang bulan Desember 1989 dikalikan dengan peranan relatif pengeluaran untuk kelompok perumahan terhadap total pengeluaran untuk konsumsi bulan Nopember 1989. Secara aljabar dapat ditulis (lihat rumus 3), dimana andil kelompok barang (i) terhadap inflasi umum dari satu kota tertentu k ditandakan seperti: $A^k_{i(n)}$:

$$\begin{aligned} A^4_{2(Des'89)} &= IHK_{2.4(Des'89)} \times W_{2.4(Nop'89)} \\ A^4_{2(132)} &= IHK_{2.4(132)} \times W_{2.4(131)} \\ &= 0,02\% \times \frac{50.797,70}{179.484,53} \\ &= 0,01\% \end{aligned}$$

Analog dengan perhitungan andil kelompok perumahan terhadap inflasi umum di Ujung Pandang, pada bulan Desember 1989, andil kelompok makanan, sandang dan aneka di Ujung Pandang, pada bulan yang sama, juga akan didapat. Jika andil-andil terhadap inflasi umum daftar dari keempat kelompok barang di atas dijumlahkan maka diperoleh inflasi umum di Ujung Pandang, bulan Desember 1989. Secara aljabar dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 I_{4(\text{Des}'89)} &= \sum_{i=1}^4 A_{i(\text{Des}'89)}^4 \\
 &= \sum_{i=1}^4 \{ \text{IHK}_{i,4(\text{Des}'89)} \times W_{i,4(\text{Nop}'89)} \}
 \end{aligned}$$

Hasil penjumlahan tersebut, lihat kolom 9 (baris terakhir), yaitu 0,90% memang, sama nilainya dengan inflasi yang dihitung dari persentase perubahan IHK (Kolom 8, baris akhir), karena inflasi umum di kota Ujung Pandang merupakan inflasi tertimbang dari inflasi keempat kelompok barang.

Persentase andil kelompok perumahan terhadap inflasi umum di Ujung Pandang (lihat rumus 3.a yang dirubah seperti rumus diatas) : $(0,01/0,90) \times 100\% = 1,11\%$ ini berarti bahwa 90,89% inflasi di Ujung Pandang, bulan

Desember 1989, dibentuk kelompok barang yang lain (makanan, sandang, aneka).

Andil kelompok perumahan di kota Ujung Pandang terhadap inflasi umum Indonesia (lihat rumus 3, yang disesuaikan) pada bulan Desember 1989:

$$\begin{aligned} A_{2.4(\text{Des}, 89)} &= A_{2(\text{Des}, 89)}^4 \times B_4 \\ A_{2.4(132)} &= A_{2(132)}^4 \times B_4 \\ &= 0,01\% \times 0,0415 \\ &= 0,000415\% \end{aligned}$$

dimana angka untuk B_4 (=Bobot Ujung Pandang di Indonesia) diambil dari lampiran 1, kolom 4.

Dengan cara sama, andil kelompok perumahan di 16 kota yang lain dari 17 kota yang dipakai dalam perhitungan inflasi di Indonesia akan diperoleh. Andil-andil di 17 Kota, jika dijumlahkan maka diperoleh andil kelompok perumahan di Indonesia terhadap inflasi umum di pada negara Indonesia.

Persentase andil kelompok perumahan di Indonesia terhadap inflasi umum di Indonesia diperoleh dengan menggunakan rumus 3.A, sesudah disesuaikan. Andil kelompok perumahan di Ujung Pandang untuk KTI, pada

bulan Desember 1989 adalah (lihat rumus 6 yang dirubah sesuai dengan variabel yang dicari disini):

$$\begin{aligned} A^{O_{2.4(Des,89)}} &= A^{4_{2(Des, 89)}} \times B^{O_4} \\ A^{O_{2.4(132)}} &= A^{4_{2(132)}} \times B^{O_4} \\ &= 0,01\% \times 0,5765 \\ &= 0,000415\% \end{aligned}$$

Dimana B^{O_4} bobot Ujung Pandang di dalam perhitungan inflasi di KTI (lihat lampiran 1, kolom 5)

Dengan cara yang sama, andil kelompok perumahan di 5 kota yang lain dari 6 kota di IBT akan diperoleh. Jumlah andil-andil di 6 kota merupakan andil kelompok perumahan di KTI terhadap inflasi umum di KTI (Rumus 6). Persentase andil kelompok perumahan di KTI terhadap inflasi umum di KTI diperoleh dengan menggunakan rumus 6.a.

C. Beberapa Catatan Penggunaan SBH 1977 - 1978

1. Bobot Kelompok Barang

Ada beberapa positif dari penggunaan rumus “Lespeyres” untuk menghitung indeks harga konsumen (IHK), yaitu:

- 1) Pertama, biaya lebih murah, karena kuantitas (jumlah) barang/jasa yang ditetapkan sebagai paket timbangan, tidak perlu di survei setiap periode,

melainkan sekali saja, yaitu kuantitas periode dasar. Yang perlu dikumpulkan adalah perubahan harganya dari waktu ke waktu.

- 2) Kedua, sudah tentu menerbitkan indeks harga konsumen akan memakan waktu sedikit yang akan lebih tepat waktu, dibandingkan dengan menerbitkan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang berdasarkan timbangan paket barang pada periode yang sedang berjalan.

Disamping segi positif sudah tentu ada juga segi negatifnya. Segi negatif dari penggunaan rumus “Laspeyres” ini muncul mana kala periode dasar yang ditetapkan digunakan untuk selang waktu yang cukup lama.

Segi negatif ini melekat pada asumsi mendasari rumus “Laspeyres” itu sendiri, yaitu menganggap peranan relatif dari setiap barang/jasa yang dikonsumsi tidak berubah. Anggapan ini tampaknya benar untuk jangka pendek sampai menengah (± 5 tahun) lewat dari periode waktu ini pasti terjadi perubahan-perubahan yang relatif besar dalam peranan relatif dari setiap barang atau jasa.

Apabila periode dasar ini digunakan terlalu lama biasanya terjadi penekanan yang berlebihan pada satu kelompok barang (terjadi penurunan kelompok lain). Akibatnya akan terjadi bisa ke atas (*over estimation*) pada kelompok pertama dan bisa ke bawah (*under estimation*) terhadap kelompok lain. Hal ini tampak pada tabel 5 berikut.

Andil kelompok barang terhadap inflasi ditentukan oleh besarnya persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari kelompok barang pada periode ke-n dan peranan relatif dari pengeluaran konsumsi barang tersebut terhadap pengeluaran pada periode sebelumnya (kepentingan relatif kelompok barang tersebut terhadap total konsumsi periode sebelumnya).

Satu ilustrasi, pada waktu puasa, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, biasanya terjadi lonjakan harga (inflasi) pada kelompok makanan dan sandang. Efek puasa, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru terhadap pembentukan inflasi umum melalui kelompok makanan akan tampak, karena peranan relatif dari pengeluaran untuk kelompok makanan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kelompok yang lain.

Akan tetapi, efek kenaikan harga (inflasi) pakaian dan kain itu di dalam pembentukan inflasi umum, melalui kelompok sandang, akan kecil karena peranan relatif dari pengeluaran untuk kelompok sandang sangat erat kecil.

Tabel 5
Perubahan Peranan Nilai Konsumsi (NK) per Kelompok
Barang di 17 Kota di Indonesia Berdasarkan Hasil Survei
Biaya Hidup (April 1977 - Maret 1978) dan April 1988 -
Maret 1989)

No. Kota		Makanan			Perumahan			Sandang			Aneka		
		77/78	88/89	^	77/78	88/89	^	77/78	88/89	^	77/78	88/89	^
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Mataraa	47,48	42,64	-10,19	22,94	22,56	-1,66	12,44	10,90	-12,38	14,67	23,89	39,38
2.	Kupang	46,22	38,60	-16,49	26,24	29,62	12,44	12,87	11,33	-11,96	17,76	20,44	39,33
3.	Manado	44,23	38,46	-13,04	25,11	29,86	18,92	13,73	10,16	-26,00	16,93	21,52	27,11
4.	Ujung Pandang	44,30	40,01	-9,68	23,34	26,45	13,32	11,61	10,72	-7,66	20,75	22,83	10,02
5.	Ambon	51,95	35,09	-32,45	21,77	30,94	42,12	10,11	12,88	27,40	16,17	21,09	30,43
6.	Jayapura	42,68	39,11	-8,36	26,06	28,90	10,90	12,10	10,51	-13,14	19,16	21,73	13,41
7.	Medan	44,66	39,09	-12,47	24,22	24,04	-0,74	9,84	12,10	22,97	21,28	24,07	13,11
8.	Padang	51,23	40,99	-19,99	19,98	24,16	20,92	11,30	11,38	0,71	17,49	23,46	14,13
9.	Palembang	50,43	43,02	-14,69	19,99	24,09	20,51	10,30	10,70	3,38	19,28	22,19	15,09
10.	Bandung	43,18	34,10	-22,11	24,58	26,57	8,10	10,37	12,31	18,71	21,27	26,96	26,75
11.	Semarang	43,87	33,94	-21,92	25,65	25,93	1,09	10,35	10,38	2,90	20,53	29,75	44,91
12.	Yogyakarta	42,70	32,28	-24,40	26,15	25,73	-1,61	10,60	11,69	10,28	20,55	30,30	47,44
13.	Surabaya	41,26	30,57	-25,91	29,20	29,98	2,67	8,68	10,50	20,97	20,86	28,95	38,78
14.	Denpasar	47,13	37,01	-10,12	26,35	28,06	6,49	8,73	8,82	1,03	17,79	26,11	46,77
15.	Pontianak	49,13	40,37	-17,83	22,36	22,31	1,56	10,75	11,76	9,40	17,76	25,16	41,67
16.	Banjarmasin	49,21	43,55	-11,50	21,80	24,87	14,08	11,30	11,40	0,88	17,69	20,19	14,08
17.	Jakarta	39,84	30,19	-24,22	27,92	30,56	9,46	10,04	11,54	14,94	22,20	27,71	24,82
	Nasional	42,61	33,55	-21,32	26,32	28,24	7,29	10,06	11,28	12,13	21,01	26,87	27,89
	KTI	45,25	39,36	-6,39	23,74	27,46	15,67	11,98	10,86	-5,84	19,02	22,34	17,46
	KSI	42,42	33,10	-21,97	26,52	28,30	6,71	9,91	11,32	14,23	21,14	27,22	28,76

Keterangan: ^ = Perubahan dalam persentase

Sumber: Data sekunder, diolah dari SBH 1977/1978 dan SBH 1988/1989. BPS Jakarta

Dari Tabel 5, tampak bahwa secara nasional, kelompok makanan mempunyai kepentingan relatif sebesar 42,61% terhadap total pengeluaran untuk konsumsi, berdasarkan hasil survey biaya hidup 1977/1978. Persentase pengeluaran untuk kelompok makanan hasil SBH 1988 sampai 1989 adalah 21,32% lebih rendah dibandingkan dengan hasil SBH 1977 sampai 1978 (Tabel 5, Kolom 5).

Padahal di dalam konsep “Leapeyres” dianggap bahwa kuantitas barang konsumsi kelompok makanan tidak berubah, seperti dilihat di dalam rumus untuk menghitung IHK (rumus 12.a.). Harga kelompok makanan SBH 1988 sampai 1989 lebih tinggi dari pada harga SBH 1977 sampai 1978 (seperti bisa dilihat dari perbandingan antara Lampiran 2 dan Lampiran 3).

Akan tetapi pengeluaran kelompok makanan SBH 1988/1989 lebih kecil, berarti bahwa kuantitas kelompok makanan yang dikonsumsi pada 1988 sampai 1989 relatif lebih kecil, yaitu relatif terhadap total konsumsi. Dari gambaran ini ada indikasi terjadi bisa ke atas (*over estimation*) terhadap bobot kelompok makanan, yang dengan sendirinya juga membawa pengaruh bisa ke atas terhadap andil kelompok makanan

terhadap inflasi di Indonesia. Sementara itu, untuk kelompok barang yang lain, yaitu perumahan, sandang dan aneka, terjadi bisa ke bawah (*under estimation*).

Mungkin kalau selang waktu penggunaan rumus “Laspeyres” kurang dari 10 tahun, misalnya 5 tahun. Tidak akan ada perubahan yang terlalu besar. Dengan demikian angka-angka yang diperoleh akan semakin mencerminkan keadaan inflasi yang sebenarnya.

2. Bobot Kota

Disamping bobot kota kelompok barang bobot kota juga menentukan di dalam perhitungan inflasi di Indonesia. Memperhatikan bobot kota ke 17 kota pada Lampiran 1 dapat disimpulkan bahwa inflasi di Indonesia untuk 50% condong mencerminkan inflasi di kota Jakarta dan Surabaya. Sementara di kota-kota yang lain, meskipun terjadi inflasi yang tinggi di sana, peranannya di dalam pembentukan inflasi di Indonesia akan relatif kecil, karena bobotnya kecil.

Sebagai contoh mengenai perubahan relatif dari bobot 15 kota (dari 17 kota yang di gunakan dalam perhitungan inflasi di Indonesia) disajikan Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6

Rata-rata Pertumbuhan Penduduk pertahun di 15 Kota
di Indonesia 1971-1980

Kota	Pertumbuhan Penduduk %
Mataram	3,5
Manado	4,1
UjungPandang	4.7
Ambon	6,3
Medan	4,0
Padang	5,1
Palembang	4,6
Bandung	336
Semarang	4,2
Yogyakarta	3,2
Denpasar	3,2
Pontianak	4,8
Banjarmasin	4,4
Jakarta	4,5

Sumber: Hugo, J.G, V.J. Hull, T.H. Hull, G.W. Jones.1987. The Demographic Dimension in Indonesian Development East Asian Science Monographs. Oxford University Press. New York. p.101-103.

Dari Tabel 6 tampak bahwa jarak (range) antara persentase terendah dan yang tertinggi hampir tiga kali lipat. Dengan demikian, sudah hampir tentu Ada perubahan dalam posisi relatif 15 kota ini, jika dibandingkan periode 10 tahun.

Setelah diuraikan tentang cara perhitungan inflasi di Indonesia, serta beberapa catatan penggunaan konsep “Lespeyres” sehubungan dengan penggunaan periode dasar 1977 sampai 1978 yang cukup lama dari 1979 sampai dengan 1989, mengenai analisis perilaku inflasi di Indonesia, periode 1985 sampai 1995,

BAB V

PERILAKU INFLASI DI INDONESIA

TAHUN 1985-1995

A. Perilaku Inflasi di Indonesia Tahun 1985-1995

Sesuai dengan tujuan penulisan buku ini, perilaku inflasi diamati dari situasi inflasi umum dan kelompok barang (makanan, perumahan, sandang dan aneka), dikaitkan dengan kegiatan ekonomi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta selama periode 1985-1995.

Tujuan yang ingin dicapai dengan mengaitkan antara pengamatan fluktuasi dan kegiatan ekonomi dari perilaku-perilaku ekonomi tersebut diatas adalah untuk mendapatkan gambaran tentang sebagian dari sumber-sumber atau faktor-faktor yang membentuk perilaku inflasi.

Secara rata-rata laju inflasi umum perbulan selama periode yang diteliti disini mencapai 0,83% atau setara dengan 9.96% pertahun (tabel. 7). Ini berarti, termasuk kategori ringan yang berarti juga sudah memenuhi target inflasi satu digit pertahun yang diinginkan oleh pemerintah.

Tabel 7.

Rata-rata Inflasi Kelom[pok barang, umum perbulan di
Indonesia, 1985-1995 (dalam %)

Kelompok Barang/Umum	U	S
Makanan	0,86	1,29
Perumahan	0,87	1,25
Sandang	0,64	1,90
Aneka	0,82	1,45
Umum	0,83	0,97

Keterangan : U = Rata-rata S = Standar Deviasi

Berdasarkan angka rata-rata dan standar devisit dapat ditarik simpulan bahwa inflasi di negara Indonesia sangat fluktuatif. Dapat gambaran bahwa besarnya angka standar deviasi sebagian besar dibentuk oleh lonjakan-lonjakan inflasi pada bulan-bulan tertentu, yang jauh yang di atas atau di bawah laju inflasi rata-rata.

Ada beberapa kegiatan ekonomi penting dari pemerintah dan swasta yang dapat dijadikan dasar untuk menelaah sebagian dari sumber-sumber atau faktor-faktor yang membentuk prilaku inflasi, kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut akan dilihat dalam hubungan dengan lonjakan-lonjakan inflasi yang diatas.

Kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan diperhatikan adalah secara lebih terperinci sebagai berikut:

1. Pertama, kebijaksanaan devaluasi rupiah terhadap \$, yang diambil pemerintah pada tanggal 12 September 1986, diduga merupakan salah satu sumber terjadinya inflasi, yang berpengaruh terhadap perilaku inflasi, selama periode pengamatan. Pengaruh devaluasi terhadap inflasi dapat terjadi secara langsung, melalui kenaikan harga barang konsumsi impor, yang terdapat di dalam semua kelompok barang. Pengaruh tidak langsung terjadi melalui penyesuaian-penyesuaian harga atau tarif barang dan jasa yang menggunakan bahan baku atau barang modal impor. (*cost-push inflation*), atau bisa juga terjadi karena tarikan pemerintah yang berasal dari luar negeri. Hal ini terjadi karena harga produksi dalam negeri menjadi lebih murah dari pihak luar negeri (*demand pull inflation*).
2. Kedua, kebiasaan masyarakat untuk merayakan atau menyambut hari-hari penting tertentu, seperti natal, tahun baru, puasa, Idul Fitri dengan membuat hidangan yang lebih banyak dan istimewa, berpakaian baru, memberi hadiah-hadiah, diduga ikut juga

berpengaruh terhadap perilaku inflasi, terutama di dalam pembentuk inflasi kelompok makanan dan sandang (*demand pull inflation*).

3. Ketiga, penyesuaian harga BBM diduga ikut juga berpengaruh di dalam pembentukan inflasi (*cost push inflation*). Pengaruh penyesuaian harga BBM terhadap inflasi terutama sekali akan terjadi melalui kelompok perumahan dan aneka, karena pada kedua kelompok ini terdapat komponen-komponen barang atau jasa yang secara langsung berhubungan dengan BBM.
4. Keempat, pengeluaran pemerintah (didalam hal ini pengeluaran pembangunan) yang realisasinya berkisar antara bulan April-Agustus pada setiap tahun anggaran. Djamin (59:1989), diduga berpengaruh terhadap inflasi. Pengeluaran ini ditujukan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan prasarana fisik, seperti gedung perkantoran, sekolah, rumah sakit, bendungan dan sebagainya. Semua itu membutuhkan bahan-bahan bangunan, seperti semen, batu bata, besi beton, dan sebagainya. Yang pada gilirannya berpengaruh terhadap inflasi umum, inflasi kelompok perumahan pada khususnya (*demand pull*

inflation) akan tetapi, kesukaran timbul dalam menelusuri secara tepat tentang kapan mulai berpengaruhnya faktor-faktor tersebut, karena waktu pencairan dana dan pelaksanaan proyek tidak serentak di seluruh Indonesia termasuk di 17 kota sampel. Pengaruhnya, hanya perkiraan saja, berkisar antara bulan April - Agustus.

Ada indikasi bahwa faktor penawaran khususnya terhadap bahan makanan, sehubungan berlangsungnya musim kemarau yang cukup panjang di sentra-sentra produksi, ikut juga berpengaruh terhadap inflasi. Akan tetapi mengingat Indonesia berbentuk kepulauan yang terletak utara dan selatan dari khatulistiwa, maka indikasi ini tampaknya agak lemah.

Benar atau tidak dugaan tentang sumber-sumber inflasi tersebut akan dilihat dari konsistensi pengaruhnya terhadap inflasi, selama periode pengamatan. Dengan kata lain akan dilihat apakah ada hubungan konsisten antara sumber-sumber yang dibedakan dan lonjakan-lonjakan inflasi. Jika hubungannya ternyata konsisten dan berkesinambungan, maka dapat diyakini bahwa faktor-faktor yang tersebut di atas benar berpengaruh di dalam pembentukan inflasi di dalam negara Indonesia.

Di dalam analisis hanya akan ada disoroti inflasi yang berada 20% atau lebih diatas rata-rata inflasi umum per bulan untuk masing-masing tahun. Walaupun pilihan 20% sedikit berubah-ubah (arbitrary), kelihatanya angka itu rupanya batas yang cocok untuk mendefinisikan lonjakan inflasi.

Berikut ini hasil analisis inflasi diuraikan secara kronologis mulai dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1995. Laju inflasi umum di Indonesia, selama tahun 1985, secara komulatif mencapai 23,16%. Maka termasuk katagori sedang. Laju inflasi umum selama periode ini banyak dibentuk oleh inflasi yang terjadi pada bulan-bulan Januari, April, Mei, Juni, Juli Agustus.

Laju inflasi umum pada bulan Januari 1985 mencapai 2,96% kekuatan yang dapat dianggap mempengaruhi pembentukan inflasi pada bulan Januari 1979 adalah perayaan Natal dan Tahun Baru diduga ikut berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia pada bulan ini, seperti mungkin dicerminkan oleh ketinggian inflasi untuk kelompok makanan dan sandang. Faktor yang lebih kuat pengaruhnya terhadap inflasi sulit ditentukan.

Pada bulan April 1985, laju inflasi umum di Indonesia mencapai 3,02%. Apabila diperhatikan tingkat inflasi pada kelompok barang, tampak bahwa tingkat inflasi yang cukup tinggi terjadi pada kelompok aneka dan perumahan. Sebab itu, sebagian dari kekuatan yang diduga berpengaruh terhadap inflasi bulan April 1985 berasal dari kenaikan harga BBM, yang berlaku mulai tanggal 1 April 1985.

Kekuatan lain yang juga diduga berpengaruh adalah realisasi APBN 1985 sampai 1986, yang dimulai pada bulan ini juga. Laju inflasi umum pada bulan Mei 1985 hampir sama dengan laju inflasi yang terbentuk pada bulan April 1985. Sumber Inflasi pada bulan ini berasal dari kenaikan inflasi yang terjadi pada kelompok perumahan dan makanan.

Kekuatan yang diduga juga berpengaruh terhadap inflasi bulan ini berasal dari kenaikan harga makanan karena pada bulan 21 Mei 1985 mulai puasa. Sumber inflasi pada kelompok perumahan tidak jelas. Sumber inflasi pada bulan Juni 1985 diakibatkan oleh Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 20 Juni 1985, dan diduga kuat berpengaruh langsung di dalam pembentukan inflasi bulan Juni 1985.

Dugaan di atas kuat jika dilihat dari inflasi kelompok makanan dan sandang, yang tampak lebih tinggi dibandingkan kelompok yang lain pada bulan-bulan tersebut. Hal ini konsisten dengan kebutuhan masyarakat pada saat puasa dan menjelang Idul Fitri terhadap bahan makanan dan sandang.

Laju inflasi umum pada bulan Juli dan Agustus 1985 diakibatkan oleh Idul Adha dan Perayaan Proklamasi Kemerdekaan RI. Di mana inflasi kelompok makanan dan sandang sangat mempengaruhi inflasi umum.

Selama tahun 1986, lalu inflasi umum di Indonesia secara kumulatif mencapai 15,97% yang berarti termasuk kategori sedang. Laju inflasi yang terbentuk selama periode ini lebih dekat dengan sasaran inflasi satu digit (dibawah 10%), yang ingin mencapai dan dipertahankan permintaan. Lonjakan-lonjakan inflasi yang menonjol terjadi pada bulan Mei, Oktober dan November 1985.

Laju inflasi pada bulan Mei 1985 mencapai 3,79% diduga dari kenaikan harga barang kebutuhan puasa dan Idul Fitri. Pada bulan Oktober dan Nopember 1985 laju inflasi umum sangat lebih tinggi dibandingkan laju inflasi pada bulan September 1985.

Jika dilihat perkelompok barang, laju inflasi yang sangat menonjol terlihat pada kelompok makanan. Tingginya laju inflasi kelompok makanan pada bulan Oktober diduga berasal dari kenaikan harga dasar dari pembelian beberapa jenis bahan makanan, seperti jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Adapun sumber inflasi pada bulan Nopember 1980 tidak dapat ditelusuri.

Selama tahun 1987 laju inflasi umum di Indonesia secara kumulatif mencapai 7,09%, yang berarti termasuk kategori ringan. Laju Inflasi selama periode ini lebih rendah dibandingkan laju inflasi kumulatif selama tahun 1985 dan 1986. Lonjakan-lonjakan inflasi hanya terjadi pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober 1987.

Sama seperti keadaan pada awal tahun 1985 dan 1986, juga untuk 1987 ditandai dengan relatif tingginya inflasi umum. Sumber inflasi pada bulan ini diduga berasal dari tarikan pemerintahan sehubungan perayaan Natal dan Tahun Baru. Pengaruh Natal dan Tahun Baru terhadap inflasi pada bulan Januari 1987, ditandai dengan tingginya laju inflasi pada kelompok makanan. Di bulan ini, kelompok sandang tidak konsisten sebagai cermin adanya pengaruh Natal Tahun Baru karena inflasinya kurang menonjol.

Pada bulan April 1987, laju inflasi umum di Indonesia mencapai 0,93% sumber inflasi pada bulan ini diduga berasal dari pengaruh realisasi APBN 1987 sampai 1988, bulan puasa dan Idul Fitri.

Pada bulan Juli 1987, laju inflasi umum mencapai 1,19%. Sumber inflasi pada bulan Juli 1987 tidak jelas. Seperti pada tahun 1986, pada bulan Oktober 1987 laju inflasi di Indonesia kembali terlihat cukup menonjol.

Jika dilihat dari Inflasi kelompok barang tampak bahwa inflasi yang cukup menonjol terjadi pada kelompok makanan. Adapun sumber inflasi pada bulan ini tidak dapat ditelusuri secara pasti karena tidak ada rujukan. Secara keseluruhan inflasi umum di Indonesia selama tahun ini relatif rendah.

Hal ini diduga karena pemerintah tidak mengadakan penyesuaian harga BBM ataupun tindakan devaluasi. Dari pengalaman tahun-tahun yang lalu terlihat bahwa dua kebijaksanaan ini yang relatif kuat terindikasi seperti ini tampak ajeg pada tahun-tahun yang akan datang, maka dapat diyakini bahwa dua kekuatan ini yang dominan pengaruhnya terhadap inflasi di Indonesia sekalipun tidak ada pengujian secara statistik atau ekonometrik.

Selama tahun 1988, laju inflasi umum di Indonesia secara kumulatif mencapai 9,69%, yang berarti termasuk kategori ringan. Laju inflasi kumulatif tahun ini lebih tinggi dibandingkan laju inflasi kumulatif setahun yang lalu. Sumber utama inflasi selama tahun ini adalah inflasi yang terjadi pada bulan Januari, Juli dan Oktober.

Pada bulan Januari 1988, laju inflasi umum di Indonesia cukup tinggi, yaitu 4,70%. Ini merupakan laju inflasi per bulan tertinggi yang pernah terjadi sejak Januari 1985. Adapun sumber inflasi pada bulan ini tidak dapat ditelusuri secara pasti karena tidak ada rujukan. Laju inflasi umum pada bulan Juli 1988 cukup menonjol. Hal ini erat hubungannya dengan pelaksanaan Idul Adha, yang jatuh pada tanggal 24 Juli 1988.

Kalau diperhatikan laju inflasi perkelompok barang, tampak juga pola yang sama dengan tahun-tahun yang lalu, dimana laju inflasi tertinggi terdapat pada kelompok makanan dan sandang.

Pada bulan Oktober 1988, inflasi kembali menunjukkan laju yang cukup menonjol. Jika dilihat inflasi kelompok barang tampak bahwa inflasi kelompok makanan, yang sekarang diikuti oleh kelompok perumahan, cukup menonjol.

Sumber inflasi yang dapat dipantau untuk kelompok perumahan adalah karena meningkatnya harga eceran semen, sementara kelompok makanan diindikasikan karena berkurang suplai bahan makanan akibat berlangsungnya musim kemarau yang cukup panjang.

Berdasarkan rujukan ini apakah pengaruh musim kemarau tidak ada pada bulan Oktober 1986 dan 1987 juga, itu hal yang sulit dijelaskan karena tidak ada keterangan yang dapat dijadikan rujukan. Selama tahun 1989 laju inflasi yang cukup menonjol terjadi pada bulan Januari, April dan Juni. Memasuki tahun 1989 laju inflasi umum di Indonesia pada bulan Januari mencapai 4,59%. Laju inflasi setinggi ini hampir sama dengan laju inflasi pada bulan Januari 1988. Sumber inflasi pada bulan ini tidak dapat ditelusuri secara pasti karena tidak ada rujukan.

Pada bulan April 1989, laju inflasi di Indonesia mencapai 2,43%. Sumber kenaikan inflasi pada bulan ini diduga berasal dari adanya kenaikan harga dasar gabah. Kenaikan harga dasar gabah dicerminkan dalam lonjakan laju inflasi untuk kelompok aneka dan makanan. Sumber lain kenaikan inflasi pada bulan ini adalah karena pada bulan April 1989 merupakan bulan puasa dan Idul Fitri.

Laju inflasi pada bulan Juni 1989 mencapai 1,58%. Sumber inflasi pada bulan ini tidak jelas. Secara keseluruhan, selama tahun 1989, laju inflasi kumulatif di Indonesia mencapai 11,46% yang berarti termasuk kategori sedang. Laju inflasi ini mendekati sasaran inflasi satu digit. Rendahnya laju inflasi umum secara kumulatif pada tahun ini, walaupun ada tekanan inflasi akibat adanya kenaikan harga dasar gabah.

Pada tahun 1990, laju inflasi di Indonesia secara Kumulatif mencapai 8,76% yang berarti termasuk kategori ringan. Laju inflasi setinggi ini sebagian besar bersumber pada laju inflasi pada bulan Januari, Pebruari, April dan Desember.

Laju inflasi umum di Indonesia pada bulan Januari 1990, mencapai 3,42%. Kekuatan yang diduga berpengaruh terhadap laju inflasi yang ini berasal dari perayaan Natal dan Tahun Baru. Hari Raya Nyepi diduga ikut juga berpengaruh terhadap inflasi pada bulan ini, terutama melalui kenaikan inflasi pada kelompok makanan.

Sumber inflasi pada bulan Februari 1990 tidak jelas. Mungkin kenaikan harga gabah melanjutkan efek-efek di bulan ini. Pada bulan April 1990, laju inflasi di Indonesia mencapai 1,31%.

Sumber kenaikan inflasi pada bulan ini diduga berasal dari adanya penyesuaian tarif angkutan yang berlaku mulai berlaku bulan ini dan realisasi APBN 1990 sampai 1991. Kenaikan tarif angkutan dicerminkan dalam lonjakan laju inflasi untuk kelompok aneka.

Menjelang tutup tahun 1990, laju inflasi pada bulan Desember kembali meningkat, yaitu mencapai 1,04%. Sumber inflasi pada bulan ini tidak dapat ditelusuri. Laju inflasi di Indonesia selama tahun 1991, secara kumulatif mencapai 4,34% yang berarti termasuk kategori ringan. Laju inflasi selama periode ini lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi pada tahun-tahun sebelumnya. Laju inflasi tertinggi selama periode ini terjadi pada bulan April dan Juli 1991.

Laju inflasi yang terjadi pada bulan April 1991 mencapai 2,49%. Laju inflasi setinggi ini diduga sebagian terbesar dipengaruhi oleh realisasi APBN tahun 1991 sampai 1992. Dugaan ini diperkuat oleh tingginya inflasi pada kelompok perumahan dan aneka. Laju inflasi pada bulan Juli 1991 mencapai 0,89%. Sumber inflasi pada bulan ini diduga berasal dari pengaruh kenaikan harga BBM pada tanggal 11 Juli 1991.

Selama tahun 1992, laju inflasi di Indonesia secara kumulatif mencapai 8,83%. Laju inflasi pada periode ini termasuk kategori ringan. Dengan kata lain, sasaran inflasi kumulatif satu digit selama setahun dapat dicapai. Lonjakan-lonjakan inflasi selama tahun ini terjadi pada bulan Januari, Mei, September dan Oktober.

Laju inflasi pada bulan Januari 1992 di Indonesia mencapai 1,26%. Ditinjau per kelompok barang, inflasi yang paling menonjol adalah pada kelompok makanan. Kekuatan yang berpengaruh terhadap laju inflasi pada bulan ini diduga berasal dari tarikan permintaan sehubungan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru.

Laju inflasi pada bulan Mei 1992 mencapai 1,27%. Sumber inflasi pada bulan ini tidak dapat ditelusuri yang tercermin dari kenaikan inflasi pada kelompok makanan dan sandang, yaitu masing-masing 2,66% dan 0,71%.

Pada bulan September dan Oktober 1992, laju inflasi di Indonesia mencapai masing-masing 2,80% dan 2,03 %. Kalau ditelusuri peristiwa yang terjadi pada bulan September, ternyata bahwa pemerintah kembali mengambil kebijaksanaan yaitu mendevaluasikan rupiah terhadap US \$.

Tindakan devaluasi yang diambil pemerintah diduga adalah sumber kekuatan yang mendorong inflasi pada bulan September 1992. Dugaan adanya pengaruh devaluasi terhadap inflasi bertambah kuat jika dilihat kembali pengalaman devaluasi 1978, 1983 dan 1986, dimana ditandai dengan tinggi inflasi pada semua kelompok barang.

Sumber inflasi pada bulan Oktober tidak jelas. Satu hal yang dapat dilihat pada bulan ini, inflasi kelompok makanan tampak begitu menonjol. Pola ini sama keadaan pada tahun 1988, maka diduga pada bulan ini juga demikian. Disamping kemarau itu, barangkali masih ada lanjutan dari efek devaluasi.

Laju inflasi Indonesia selama tahun 1993, secara kumulatif mencapai 8,90%, yang berarti termasuk kategori ringan. Laju inflasi selama tahun ini hampir sama dengan laju inflasi setahun yang lalu. Laju inflasi dalam periode ini banyak dibentuk oleh inflasi pada bulan Februari, Mei, Oktober dan November 1993.

Sumber inflasi pada bulan Februari diakibatkan oleh pengaruh kenaikan BBM pada tanggal 17 Januari 1993, dimana inflasi yang paling menonjol yaitu pada kelompok

aneka sebesar 3,04% dan makanan sebesar 1,33%. Pada bulan Mei laju inflasi umum mencapai 1,85%.

Apabila ditelusuri penyebab inflasi yang cukup menonjol pada bulan Mei, maka erat hubungannya penetapan APBN tahun anggaran 1993/1994 dimana penerima negara sebelumnya mengalami peningkatan. Kenaikan tersebut disebabkan oleh lonjakan permintaan masyarakat terhadap bahan makanan dan sandang.

Pada bulan Oktober dan Nopember 1993 laju inflasi umum masing-masing mencapai 1,37% dan 1,75%. Pada periode ini ada rujukan bahwa sumber inflasi adalah akibat dinaikkannya harga dasar pembelian gabah dan palawija dan berkurangnya suplai bahan makanan sehubungan terjadinya kemarau panjang.

Hal lain yang menarik pada tahun 1993 adalah kecenderungan naiknya inflasi kelompok makanan sejak bulan Juli 1993. Apakah ini hanya suatu kebetulan, ataukah merupakan indikasi adanya musim kemarau yang cukup panjang, ataukah ada faktor yang lain, sulit ditetapkan.

Selama periode Januari periode Januari-Desember 1994, laju inflasi umum di Indonesia secara kumulatif mencapai 5,47% yang berarti termasuk kategori ringan.

Kalau diperhatikan laju inflasi setiap bulannya, selama tahun ini, terlihat bahwa secara rata-rata terdapat stabilitas harga yang cukup mantap, dimana laju inflasi umum berada dibawah atau sekitar 0,50% setiap bulannya. Laju inflasi yang agak menonjol terjadi pada bulan April, Mei dan Juli.

Laju inflasi pada bulan April dan Mei diduga berasal dari penetapan APBN tahun anggaran 1994/1995. Dugaan ini diperkuat oleh tingginya inflasi kelompok makanan dan sandang, karena makin membaiknya penerimaan pemerintah dari sektor minyak.

Lonjakan inflasi terjadi lagi pada bulan Juli, dimana laju inflasi mencapai 1,11%. Sumber utama kenaikan inflasi pada bulan ini tidak dapat dipantau. Laju inflasi umum di Indonesia yang tertinggi hingga Agustus tahun 1995 adalah pada bulan April 1995 yaitu sebesar 1,57%, yang disebabkan oleh realisasi APBN tahun 1995 sampai 1996 dan membaiknya harga minyak di luar negeri. Laju inflasi ini termasuk kategori ringan. Secara rata-rata laju inflasi ini hampir sama dengan laju inflasi pada periode 1995.

Setelah diuraikan pola perilaku inflasi di Indonesia pegangan untuk menarik simpulan tentang perilaku dan sumber-sumber atau faktor-faktor yang berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia.

Upaya pemerintah di dalam mengendalikan inflasi satu Inflasi satu digit pertahun sudah berhasil. Inflasi di Indonesia sangat responsif terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik pemerintah maupun swasta. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang paling kuat dan ajeg mempengaruhi fluktuasi inflasi di Indonesia dan yang juga merupakan faktor yang mempengaruhi pembentukan inflasi di negara Indonesia di dalam penulisan buku ini.

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan mendevaluasi rupiah. Kegiatan ekonomi swasta yang berpengaruh terhadap perilaku inflasi dan terindikasi mempengaruhi pembentukan inflasi di Indonesia adalah puasa, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.

Faktor-faktor yang berpengaruh di dalam proses pembentukan inflasi di Indonesia tersebut di atas ternyata memberi konfirmasi terhadap temuan-temuan dari beberapa pemerhati masalah inflasi di Indonesia seperti Iswardono, Parenta, Cittoharjanto dan Widiatmodjo.

Yang belum dapat ditelusuri secara eksplisit adalah pengaruh uang beredar terhadap inflasi di Indonesia. Berdasarkan simpulan ini, dapat dibuat simpulan selanjutnya, bahwa metode dekomposisi dapat menyumbang bagi kejelasan tentang perilaku inflasi di negara Indonesia.

Implikasinya adalah bahwa keberhasilan pengendalian inflasi di Indonesia, agar tercapai inflasi satu digit pertahun, akan ditentukan, antara lain oleh keberhasilan dalam menjaga stabilitas harga kelompok makanan dan perumahan, yang berhubungan dengan terjadi peristiwa-peristiwa yang disebutkan.

B. Andil Kelompok Barang, KTI dan KBI Dalam Pembentukan Inflasi di Indonesia Tahun 1985-1995.

Inflasi di Indonesia (gabungan 17 kota di Indonesia) pada bulan tertentu, diukur dari jumlah persentase-persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) (inflasi) kelompok barang pada bulan tersebut di setiap kota, yang ditimbang dengan bobot kota bersangkutan.

Dengan cara itu, andil setiap kelompok barang, KTI dan KBI di dalam pembentukan inflasi di Indonesia dapat pula diketahui, seperti disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8

Rata-rata Persentase Andil Kelompok Barang, KTI, KBI di dalam Pembentukan Inflasi di Indonesia, 1985-1995

Kelompok Barang/Umum	Persentase Andil		
	KTI	KBI	Indonesia
Makanan	4,80	48,00	52,80
Perumahan	2,40	20,80	23,20
Sandang	0,80	5,60	6,40
Aneka	0,80	16,80	17,60
Umum	8,80	91,20	100,00

Keterangan: $4 = 2 + 3$

Sumber: Biro Pusat Statistik, Jakarta, 1995.

Berdasarkan persentase andil kelompok barang (Tabel Kolom 4), yaitu bahwa inflasi di Indonesia sebagian besar berasal dari inflasi yang terjadi pada kelompok besar berasal dari inflasi yang terjadi pada kelompok makanan dan perumahan semakin kuat.

Karenanya, keberhasilan di dalam menjaga stabilitas kelompok makanan dan perumahan, selanjutnya akan menentukan keberhasilan mencapai inflasi satu digit per tahun. Berdasarkan andil KTI dan KBI di dalam pembentukan inflasi di Indonesia (Tabel 8 kolom 2 dan 3), tidak dapat diambil simpulan apapun yang dapat memperjelas perilaku inflasi di Indonesia, selama belum diketahui apakah ada perbedaan antara ketinggian inflasi di KTI dan KBI.

Perbedaan andil yang sangat menonjol antara KTI dan KBI mesti disebabkan sebagian besar karena bobot kota-kota di KTI sangat lebih kecil dibandingkan dengan di KBI. Disamping itu, jumlah kota-kota di KTI hanya enam, di KBI sebelas kota. Namun demikian, perbedaan andil antara KTI dan KBI di dalam pembentukan inflasi di Indonesia, yaitu bahwa inflasi Indonesia lebih condong mencerminkan keadaan inflasi di KBI.

Setelah mendapatkan gambaran tentang perilaku inflasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, begitu juga tentang pola sumbangan kelompok barang, serta andil KTI dan KBI di dalam pembentukan inflasi di Indonesia, selanjutnya diuraikan hasil analisis perbandingan perilaku inflasi, serta pola sumbangan kelompok barang di dalam pembentukan inflasi antara KTI dan KBI.

BAB VI

DEKOMPOSISI INFLASI ANTARA KTI DAN RBI TAHUN 1985-1995

A. Perbandingan Perilaku Inflasi Antara KTI dan KBI Tahun 1985-1995.

Pengamatan berkenaan dengan perilaku inflasi di KTI dan KBI mengikuti cara pengamatan perilaku inflasi di Indonesia (gabungan 17 kota di Indonesia), yaitu dari fluktuasi inflasi umum dan kelompok barang, dikaitkan dengan kegiatan pemerintah dan swasta.

Untuk mengetahui apakah ada atau tidak perilaku inflasi antara KTI dan KBI, selama periode pengamatan, akan dilihat apakah ada perbedaan atau tidak perbedaan rata-rata inflasi perbulanan antara kedua wilayah tersebut. Jika tidak ada perbedaan, maka sumber-sumber inflasi yang penting dan yang berpengaruh di dalam pembentukan inflasi di Indonesia, juga penting di KTI dan KBI.

Alasannya adalah bahwa inflasi di Indonesia merupakan rata-rata tertimbang dari inflasi di 17 kota di

dalam negara Indonesia. Inflasi di kota-kota tersebut, setelah dikelompokkan menjadi KTI dan KBI, digunakan untuk menghitung inflasi KTI dan KBI yang bersesuaian.

Hasil perhitungan rata-rata perbulan di KTI dan KBI, selama periode pengamatan, disajikan di dalam tabel 9 berikut:

Tabel 9.

Rata--rata Inflasi Kelompok Barang dan Umum
di KTI, KBI, 1985-1995 (dalam %)

Kelompok Barang/Umum	KTI		KBI'		KBI''	
	U	S	U	S	U	S
Makanan	0,91	1,27	0,90	1,34	0,92	1,36
Perumahan	0,94	1,75	0,87	1,27	0,90	1,22
Sandang	0,56	1,11	0,65	0,93	0,76	0,94
Aneka	0,66	1,55	0,86	1,49	0,91	1,40
Umum	0,86	1,03	0,87	1,01	0,85	1,01

Keterangan: u= Rata-rata S= Standar deviasi

Sumber : Lampiran 22 s.d 26.

Memperhatikan rata-rata inflasi kelompok barang dan umum, perbulan di KTI, KBI' dan KBI'', dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata tingat inflasi di KTI dan di KBI

untuk kelompok barang umum tidak jauh berbeda. Akan tetapi, simpulan ini agak diganggu oleh ketinggian standar deviasi.

Bila diamati lebih jauh nilai rata-ratanya per kelompok barang, menunjukkan perilaku yang sangat bervariasi. Untuk kelompok barang makanan, tidak terdapat perbedaan yang berarti. Nilai rata-rata antara KTI dan KBI. Pada kelompok perumahan rata-rata KTI, lebih tinggi dibanding KBI, baik dengan memasukkan DKI Jakarta maupun tidak.

Pada sisi lain Kelompok barang sandang aneka barang dan jasa ternyata ratanya lebih rendah di KTI dibanding KBI. Hal ini merupakan indikasi awal bahwasanya kelompok barang makanan dan perumahan memberikan sumbangan lebih besar terhadap pembentukan inflasi di KTI dibanding di KBI. Sebaliknya untuk kelompok sandang dan aneka barang dan jasa lebih besar di KBI dibanding di KTI.

Untuk melihat lebih jauh signifikannya perbedaan dengan analisis varians. Hipotesis nihil (H_0) yang diajukan: bahwa tidak ada perbedaan rata-rata tingkat inflasi kelompok barang maupun antara KTI, KBI' dan KBI". Hasil perhitungan analisis varians menunjukkan bahwa H_0

diterima. Hasil ini memperkuat simpulan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata inflasi "kelompok barang dan umum, antara KTI dan KBI".

Demikian, adalah cukup alasan untuk menganggap bahwa faktor-faktor yang memperlihatkan sebagai faktor penting untuk menjelaskan inflasi di seluruh Indonesia, juga mempunyai peranan begitu di KTI dan KBI. Setelah mengamati perilaku inflasi di KTI dan KBI melalui pengamatan fluktuasi inflasi kelompok barang dan umum, selanjutnya diuraikan analisis perbandingan persentase andil kelompok barang dalam pembentukan inflasi antara KTI dan KBI.

B. Perbandingan Pola Sumbangan Kelompok Barang Dalam Pembentukan Inflasi Antara KTI dan KBI Tahun 1985-1995.

Menguraikan hasil analisis perbandingan pola sumbangan (andil) kelompok barang, antara KTI dan KBI (dengan Jakarta) dan KBI' (tanpa Jakarta). Persentase andil kelompok barang terhadap inflasi di KTI, KBI' dan KBI" secara rata-rata, selama periode pun umum antara KTI dan KBI disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10.

Rata-rata Persentasi Andil Kelompok Barangdi dalam
Pembentukan Inflasi di KTI, KBI' danKBI'' 1985-1995.

Kelompok Barang/Umum	KTI		KBI'		KBI''	
	U	S	U	S	U	S
Makanan	173,74	140,34	185,50	140,33	119,20	75,80
Perumahan	75,59	119,79	127,92	81,10	85,54	80,67
Sandang	51,62	102,23	94,42	188,35	73,74	123,23
Aneka	77,75	125,34	86,70	118,32	76,16	77,26

Keterangan: u= Rata-rata S= Standar deviasi

Rata-rata persentase andil kelompok barang di dalam pembentukan inflasi di KTI dan KBI, rupanya tidak menunjukkan perbedaan yang cukup berarti. Untuk menguji apakah ada atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata persentase andil kelompok barang terhadap inflasi di KTI, KBI' dan KBI'' dilakukan analisis varians.

Hipotesis nihil (H_0) yang diajukan: bahwa tidak ada perbedaan rata-rata (u) persentase andil kelompok barang di dalam pembentukan inflasi antara KTI dan KBI. Hasil analisis varians rata-rata persentase andil kelompok barang terhadap inflasi di KTI, KBI disajikan secara ringkas dalam Tabel 11.

Tabel itu menunjukkan, pada derajat signifikansi 1%, perbedaan rata-rata persentase andil kelompok makanan terhadap inflasi umum antara KTI, KBI' dan KBI'', hampir signifikan dibandingkan dengan kelompok lain selain dari pada kelompok makanan.

Pada derajat signifikansi ini, perbedaan rata-rata persentase andil kelompok perumahan, sandang dan aneka, di dalam pembentukan inflasi antara KTI dan KBI tidak signifikan. Akan tetapi, pada derajat signifikan 5%, kelompok makanan, perumahan dan aneka mungkin signifikan (*probably significant*) sedangkan kelompok sandang saja tidak signifikan.

Tabel 11

Ringkasan Hasil Analisis Varians Rata-rata Persentase Andil Kelompok Barang Terhadap Inflasi di KTI, KBI' dan KBI'', 1985-1995

Kelompok Barang	F-hitung	T-tabel	
		5%	1%
Makanan	10,61	3,03	4,71
Perumahan	7,79	3,03	4,71
Sandang	8,13	3,03	4,71
Aneka	4,03	3,03	4,71

Sumber : F-hitung : Lampiran 13, 14, 15, dan 16

F-tabel : Lampiran 17

Berpedoman pada: (1) hasil analisis, pada sub 6.1 (2) kurang kepersisan data, antara lain sebagian data persentase andil kelompok barang yang bernilai negatif diabaikan dan pembulatan angka menjadi dua digit dibelakang koma; (3) belum diajukan keterangan lain yang lebih rinci untuk menerangkan ada atau tidaknya perbedaan antara KTI dan KBI; (4) hasil analisis varians pada $\alpha = 1\%$, dapat dibuat simpulan bahwa, kecuali kelompok aneka barang dan jasa terdapat perbedaan yang signifikan dalam pola sumbangan kelompok barang di dalam pemhentukan inflasi antara KTI dan KBI.

Sekali lagi, andil kelompok barang terhadap inflasi ditentukan oleh tingkat inflasi dan bobot relatif dari kelompok barang. Pada kelompok makanan, disamping laju inflasinya tinggi, bobot relatifnya (hasil SBH 1977/1978) juga tinggi. Perbedaan dalam rata-rata tingkat inflasi kelompok makanan antara KTI dan KBI tidak signifikan.

Ini berarti bahwa perbedaan dalam pola sumbangan kelompok makanan terhadap inflasi umum antara KTI dan KBI tentu disebabkan adanya perbedaan dalam bobot relative kelompok makanan. Perbedaan ini merupakan cerminan adanya perbedaan dalam pola konsumsi.

Salah satu ciri dari masyarakat miskin ialah bahwa pengeluaran masyarakat sebagian besar untuk membeli bahan makanan. Dengan demikian, perbedaan dalam pola sumbangan kelompok terhadap inflasi umum antara KTI dan KBI dapat dijadikan indikasi bahwa masyarakat KTI lebih miskin dibandingkan dari pada dengan masyarakat di KBI.

Simpulan lain bahwa, baik di KTI maupun di KBI, sumbangan terbesar didalam pembentukan inflasi umum masing-masing adalah berasal dari kelompok makanan dan perumahan. Pada tahapan analisis inflasi umum dan kelompok barang menunjukkan bahwa perbedaan perilaku inflasi antara KTI dan KBI signifikan, kecuali dalam pola sumbangan kelompok makanan. Disamping itu, temuan ini memperkuat simpulan-simpulan yang sudah dibuat dalam bab sebelumnya.

BAB VII

ANALISIS PERILAKU INFLASI NEGARA INDONESIA

Berdasarkan analisis yang sudah diuraikan pada dalam buku ini, dapat ditarik sebagai kesimpulan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data inflasi di Indonesia dapat menyumbang bagi kejelasan perilaku inflasi di Indonesia dan perbedaan perilaku inflasi antara KTI dan KBI.

Perilaku inflasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah dan swasta. Dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang ditelusuri ini, yang paling kuat pengaruhnya terhadap perilaku inflasi di Indonesia ialah kebijaksanaan pemerintah menaikkan harga BBM (*cost-push inflation*).

Pengaruh kenaikan harga BBM terutama tercermin pada tingginya laju inflasi pada kelompok perumahan, karena pada kelompok perumahan ini terdapat komponen barang yang secara langsung berkaitan BBM, seperti minyak tanah dan tarif listrik, bobotnya besar.

Kecuali kenaikan harga BBM juga kebijaksanaan devaluasi merupakan faktor dengan pengaruh kuat terhadap perilaku inflasi di Indonesia. Dalam hal ini pengaruhnya tercermin pada kenaikan harga untuk semua kelompok barang dan jasa.

Dari semua kegiatan-kegiatan ekonomi swasta yang dapat mempengaruhi inflasi hanya satu, yaitu kekuatan permintaan sehubungan dengan perayaan hari-hari penting tertentu, seperti puasa, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Sumber ini rupanya mempunyai pengaruh tetap (*demand pull inflation*).

Pengaruh faktor ini terutama tercermin pada tingginya laju inflasi pada kelompok makanan karena pada saat perayaan penyambutan hari-hari penting itu, terjadi peningkatan permintaan terhadap bahan makanan, sehingga harganya meningkat sedangkan bobotnya memang besar sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi inflasi di negara Indonesia.

Pada hari-hari ini sering kelompok sandang ikut serta berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia, khususnya pada puasa dan Idul Fitri, yang mungkin mencerminkan perbedaan dalam cara merayakan pesta-pesta keagamaan.

Nilai rata-rata laju inflasi baik secara umum maupun berdasarkan kelompok barang antara KTI dan KBI tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Berdasarkan andil kelompok barang terhadap pembentukan inflasi ternyata menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara KTI dan KBI, kecuali kelompok aneka barang dan jasa pada tingkat keyakinan 1%.

Andil kelompok barang terhadap inflasi umum ditentukan oleh tingkat inflasi dan bobotnya sehingga dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan dalam pola pengeluaran penduduk dimana persentase pengeluaran untuk bahan makanan di KTI lebih besar dibandingkan dengan di KBI.

Hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa lebih miskin dibandingkan di KBI. Nilai rata-rata inflasi baik secara umum, maupun berdasarkan kelompok barang tidak mempunyai perbedaan yang signifikan, meskipun demikian ternyata perbedaan andil setiap kelompok barang terhadap pembentukan inflasi di Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan antara KTI dan KBI.

Implikasi guna pengendalian inflasi, membutuhkan perlakuan kebijaksanaan yang berbeda antara KTI dan KBI. Mengingat kelompok makanan dan kelompok perumahan mempunyai nilai rata-rata yang lebih tinggi di KTI, maka

kebijaksanaan pengendalian inflasi perlu menekankan pada kedua kelompok barang ini, antara lain melalui kebijaksanaan memperlancar arus distribusi, disamping peningkatan produksi.

Sebaliknya pengendalian inflasi di KBI, kelompok barang sandang dan aneka barang dan jasa, perlu mendapat perhatian yang cukup besar. Mengingat inflasi di Indonesia di KTI dan KBI, responsif terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik pemerintah maupun swasta, maka atas dasar analisis ini, pemerintah pada saat atau sesudah mengambil kebijakan ekonomi, seperti kebijaksanaan menaikkan harga BBM, juga pada bulan-bulan Puasa, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, supaya dilakukan pengawasan yang ketat, sehingga sasaran laju inflasi satu digit dapat dicapai, juga masyarakat tidak menanggung beban inflasi yang terlalu berat.

Memberi tekanan pada kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut, tidak berarti bahwa mungkin ada kegiatan lain yang sama atau lebih penting. Dilihat dari sudut pola sumbangan kelompok barang didalam pembentukan inflasi di Indonesia maka disarankan kepada pemerintah agar pengendalian inflasi lebih ditekankan pada kelompok

makanan dan perumahan, sehingga sasaran inflasi satu digit pertahun dapat dicapai secara efektif.

Pendekatan dekomposisi yang digunakan dalam penelitian ini belum digunakan untuk menelusuri andil perjenis kelompok barang terhadap inflasi di dalam negara Indonesia. Juga belum digunakan untuk menelusuri sumber inflasi yang berasal dari kegiatan ekonomi selain dari yang disebutkan dalam tesis ini, atau dari inflasi luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, MA, Jaya Azis I., Pangestus M., dan Soesastro H., 1991. "The Indonesian Economy Problem and Prospects", Journal, Vol. 5, No. 2, July 1991.
- Anonim, "Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis", Edisi Februari 1994, Program Pasca Sarjana, UGM (tidak dipublikasikan)
- Arief, S. 1990. Pendekatan Baru Mengenai Inflasi, Kompas 18 Desember.
- _____. 1993. "Metodologi Penelitian Ekonomi" UI Press.
- Budiono, 1993, Teori Moneter Bagian, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Forgiel, M. 1978. The Statistics Problem Solver, Research and Education Association, New York.
- Gaspers V. 1990. Analisis Kuantitatif untuk Perencanaan, Penerbit Tarsito Bandung.
- Grenville, S. 1981. Monetary Policy and the formal Financial Sector, in Booth, A., and P. Mc. Cawley. 1981. The Indonesia Ekonomi During The Soeharto Era. Oxford University Press New York.
- Haris, S. 1994. Menangkap Peluang Demokrasi. Beberapa Segi Politik Pembangunan KTI : CSIS Thn. No. XXIII, 1 Januari - Pebruari 1994
- Hillier. 1986. Macroeconomic Models, Debates and Development- Oxford University Press Singapore

- Insukindro 1993. *Ekonomi Uang dan Bank, Teori dan Pengalaman di Indonesia*, Bagian penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____, 1992. *Pembentukan Model Dalam Penelitian Ekonomi*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Iswara, A., dan Nopirin. 1986. *Ekonomi Moneter Ringkasan Bacaan Terpilih*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Iwardono, S.P. 1989. *Uang dan Bank*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- _____, 1988. *Survei Model-Model Inflasi*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Kafiar, A. 1990. *Potensi Sumberdaya Manusia Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua, Perspektif Pengembangannya di Kawasan Timur Indonesia*, Makalah dalam Seminar Strategi Pembangunan Jangka Panjang Kedua Kawasan Timur Indonesia, Ujung Pandang.
- Killick, T. 1981. *Policy Economic: A Textbook of Applied Economic on Developing Countries*. Heinemann, London
- Kothari, C. 1978. *Quantitative Techniques* Vikas Publishing House Pvt. Ltd, New Delhi
- Manullang, M. 1983. *Ekonomi Moneter*, CV. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Monerey, M. 1976. *Feats From Figures*. Pinvguin Books, Ltd., England.

- Nopirin, 1987. Ekonomi Moneter Buku II, Fakultas Ekonomi Gadjah Madam Yogyakarta
- Nasir, M. 1985. Metode Penelitian,. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Panetto, A.R. 1987. Perkembangan Industri, Kesempatan Kerja dan Perkembangan Perekonomian Indonesia. Disertasi. Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- _____, 1990. Prospek Investasi di Indonesia Bagian Timur dalam Pelita V, Seminar Nasional. Ujung Pandang
- Parenta, T. 1991. Inflasi, Harga yang Harus Dibayar Untuk Pertumbuhan Ekonomi.
- Qazuini, N. 1990. Pembangunan Pengeolahan Hasil-hasil Pertanian di Indonesia Bagian Timur, Makalah dsalam Seminar Strategi Pembangunan Jangka Panjang Kedua Kawasan Timur Indonesia, Ujung Pandang
- Senopati Idewa Ketut Yudha, 1995. Kecepatan Penyesuaian Tingkat Inflasi Dalam Kaitannya dengan Implementasi Kebijakan Moneter Indonesia. Tesis. UGM (tidak dipublikasi)
- Surachmad W. 1985. Metodologi Research, Bima Aksara, Jakarta
- Wijawa F, 1992. Ekonomikamakri, Edisi III, Bagian Penberit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.